



BUPATI LAMONGAN

LAPORAN

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2003**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Bab. I	
Pendahuluan	1
Bab. II	
Perencanaan Strategik	6
A. Visi dan Misi	6
B. Tujuan dan Sasaran	41
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	44
Bab. III	
Akuntabilitas Kinerja	49
A. Evaluasi Kinerja	49
B. Analisis Pencapaian Kinerja	73
C. Aspek Keuangan	108
Bab. IV	
Penutup	112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban Bupati untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan misi untuk meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dapat ditegakkan dengan melalui beberapa aspek diantaranya adalah aspek akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program. Penyusunan laporan akuntabilitas ini dilakukan dengan analisa SWOT yaitu berdasarkan perencanaan strategis yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan apa dan kapan yang hendak di capai dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah strategis untuk memilih alternatif cara-cara terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Cara pencapaian tujuan

dan sasaran tersebut tertuang dalam suatu rencana operasional yang menyeluruh dan terpadu meliputi :

- Penetapan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati yang merupakan kumpulan keputusan mengenai pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu, mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran serta penciptaan situasi yang mengarahkan kepada keadaan di mana setiap pelaksana mengetahui bahwa mereka memperoleh dukungan untuk bekerja mengimplementasikan keputusan ;
- Program kerja operasional merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja ;
- Kegiatan atau aktivitas yang sangat memperhitungkan sumberdaya maupun lingkungan organisasi yang harus dilakukan dalam merealisasikan program kerja operasional yang ditetapkan dalam penyusunan kegiatan juga memperhatikan lingkungan internal maupun eksternal yang dirumuskan secara SMART.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasinya perlu melalui tahapan-tahapan antara lain :

1. Penetapan indikator kinerja ;
2. Penetapan standar kinerja ;
3. Pengumpulan data kinerja ;
4. Pengukuran kinerja ;
5. Evaluasi pengukuran kinerja.

Berkaitan terhadap pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000, Pasal 4 bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra, dan tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan **Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999**, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakip Bupati Lamongan Tahun 2002 adalah media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Bupati lamongan pada tahun 2002.

Lakip Bupati Lamongan tahun 2002 merupakan kegiatan yang pertama kali di laksanakan sejak diberlakukannya secara efektif renstra tahun 2002 -2006 perda no.6 th. 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kab.Lamongan th. 2002 -2006 .Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Inpres no.7 th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan RENSTRA Kabupaten Lamongan tahun 2002 -2006 yang berfungsi sebagai tolak ukur kinerja Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati yang merupakan gambaran kinerja Bupati, juga sebagai penajaman Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001 – 2005 yang setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Bupati Lamongan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menilai pertanggung jawaban terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis masing-masing unit kerja. Sedangkan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan.

Adapun maksud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bupati Lamongan ditujukan kepada Gubernur sebagai wahana laporan pelaksanaan tugas untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun.

Sedangkan tujuannya ialah sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

A. VISI DAN MISI

VISI

Pengertian **Visi** secara harfiah adalah cita-cita atau obsesi ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, maka **Visi** adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. **Visi** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. **Visi Kabupaten Lamongan** adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Kabupaten Lamongan dimasa mendatang dan **Visi** selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan dan hambatan masyarakat.

Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut maka ditetapkan **Visi Kabupaten Lamongan** sebagai berikut : **"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera, maju, rukun, damai, adil dan berakhlak mulia"**.

Dari Visi dimaksud dikandung harapan dapat mewujudkan masyarakat Lamongan yang memiliki kualitas iman tinggi, beramal sholeh, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air dan daerah, berkecukupan kebutuhan hidupnya, dinamis, pikiran kedepan, mandiri dan responsif terhadap perubahan, saling menghargai dan menghormati, bergotong royong serta dapat menempatkan hak dan kewajibannya secara proporsional.

MISI

Misi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan keharmonisan masyarakat yang didukung dengan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perwujudan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian, kelautan, industri dan perdagangan.
4. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi utamanya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
5. Peningkatan keseimbangan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkepribadian dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.
6. Peningkatan kualitas keseimbangan pelayanan masyarakat melalui penyediaan jasa publik yang transparan, responsive dan bertanggungjawab serta professional.
7. Penjaminan terhadap masyarakat atas keamanan ketertiban dan ketentraman.

Analisis Lingkungan Internal adalah analisis untuk mengetahui kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki keuntungan Strategik dalam mencapai sasaran, hal ini bermakna sebagai Kekuatan (**Strength**).

Sedangkan situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lamongan gagal mencapai tujuannya, hal ini bermakna sebagai Kelemahan (**Weakness**).

Adapun yang menjadi Kekuatan (**Strength**) Pemerintah Kabupaten Lamongan, meliputi :

- a. **Berlakunya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 ;**

Berlakunya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus, mengatur dan mengolah daerah sesuai dengan

kebutuhan rumah tangga sendiri. Oleh karena itu kewenangan yang luas ini merupakan sumber kekuatan bagi pengembangan dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan daerah dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Kehadiran kedua Undang-undang tersebut memberikan isyarat bahwa otonomi daerah tidak sekedar pendelegasian otoritas dan penambahan sejumlah urusan kepada daerah, tetapi lebih dari itu merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengembalikan hak otonomi masyarakat di daerah, berikut membangkitkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan secara wajar, adil dan demokratis.

b. Terbentuknya Lembaga-lembaga Perangkat Daerah ;

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Lembaga-lembaga Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui beberapa Peraturan Daerah. Adapun lembaga-lembaga Perangkat Daerah yang terbentuk meliputi: Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten dan 12 bagian, Sekretariat DPRD 1 unit dengan 2 bagian, Badan 3 unit, Dinas 8 unit dengan beberapa unit pelaksanaan teknis (UPT), Kantor 11 unit, Kecamatan 27 unit dan 12 unit kelurahan.

Terbentuknya Kelembagaan Daerah, tersebut sangat mendukung terhadap akses dan implementasi kebijakan daerah, dan dengan tersedianya unit-unit pelayanan masyarakat merupakan salah satu kekuatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan lebih baik.

c. Tersedianya Jumlah Penduduk Yang Memadai ;

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 1980 tercatat sebanyak 1.049.956 jiwa, sepuluh tahun kemudian atau Sensus Penduduk 1990 tercatat sebanyak 1.143.431 jiwa dan pada Sensus Penduduk 2000 menjadi 1.181.660 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa secara absolut jumlah penduduk Kabupaten Lamongan terus bertambah, tetapi dilihat dari prosentase pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun periode 1980-1990 sebesar 0,86 persen, sedang pada periode 1990-2000 menurun menjadi 0,34 persen pertahun.

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada Tahun 2001 sebanyak 1.210.879 jiwa yang terdiri dari 578.535 jiwa penduduk laki-laki dan 603.125 jiwa penduduk perempuan. Sebanyak 195.122 jiwa (16,51 %) tinggal di wilayah pedesaan yang merupakan wilayah dominan di Kabupaten Lamongan.

Tingkat keberadaan penduduk Kabupaten Lamongan pada Tahun 2001 adalah 653 orang per km², kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Paciran : 1.708 jiwa per km², Kecamatan Lamongan 1.482 jiwa per km², dan Kecamatan Babat : 1.248 jiwa per km². adapun Kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Solokuro : 346 jiwa per km², Kecamatan Ngimbang : 364 jiwa per km², dan Kecamatan Sambeng : 248 jiwa per km².

d. Meningkatnya Pendapatan Perkapita ;

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2001, sekita 64 % penduduk Kabupaten Lamongan masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sisanya tersebar pada sektor perdagangan, jasa-jasa dan industri pengolahan.

Sampai dengan Tahun 2001, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan di dalam Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan. Kontribusi sektor ini mencapai 52,92 %.

Disamping mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian, besarnya sumbangsih sektor ini juga disebabkan oleh luasnya lahan pertanian yang mencapai separuh lebih luas Kabupaten Lamongan. Namun luas lahan sawah tersebut diperkirakan belum mampu mengangkat kesejahteraan petani. Hal ini dimungkinkan karena 40 % dari lahan sawah masih merupakan sawah tadah hujan (non irigasi). Sektor industri pengolahan yang diharapkan menjadi leading sektor bagi sektor lain, masih belum berkembang di Kabupaten Lamongan.

Income perkapita pertahun penduduk Kabupaten Lamongan atas dasar harga berlaku (harga tahun berjalan) selama 3 tahun terakhir berturut-turut sebesar Rp. 2,07 juta, Rp. 2,26 juta dan Rp. 2,49 juta.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat tersebut merupakan salah satu indikasi meningkatnya kesejahteraan karena meningkatnya daya beli masyarakat dan

investasi masyarakat. Hal ini bermakna kekuatan bagi Kabupaten Lamongan.

e. Budaya Masyarakat Agamis yang Beretos Kerja Tinggi dan Partisipatif dan Adanya Potensi Daerah Yang Masih Memungkinkan Digali dan Dikembangkan ;

Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumber daya manusia relatif cukup besar memiliki budaya yang agamis, terbuka, jujur dan ulet serta mempunyai jiwa wirausaha dan kepekaan sosial yang cukup tinggi. Melalui budaya yang agamis, beretos kerja tinggi, mampu menjadi pendorong, pengarah dan pengendali pembangunan serta mampu memberikan rumusan yang dinamis, kreatif dan inovatif yang sanggup membangkitkan gairah partisipasi, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi dan mencegah adanya praktik-praktik yang tidak terpuji.

Kabupaten Lamongan yang secara geografis memiliki potensi daerah yang sangat membanggakan bahkan dapat

dikatakan sebagai penyangga terhadap perekonomian Jawa Timur. Potensi daerah yang dimaksud berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Kabupaten Lamongan memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang relatif cukup besar, dimana pada Tahun 2000 jumlah penduduknya sebanyak 1.200.051 jiwa. Sedangkan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Lamongan meliputi sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Selain potensi-potensi tersebut, Kabupaten Lamongan juga memiliki potensi laut yang kedalamannya memenuhi persyaratan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan laut. Kawasan Pantura yang merupakan daerah pegunungan kapur yang jenis tanahnya litosal dan mediteran kaya akan bahan tambang. Potensi-potensi yang dimiliki tersebut, masih belum digali dan dikembangkan secara optimal, sehingga potensi daerah tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sedangkan yang menjadi Kelemahan (**Weakness**)
Pemerintah Kabupaten Lamongan, meliputi :

a. Terbatasnya Keuangan Daerah ;

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dukungan dana pembiayaan yang memadai merupakan syarat utama Pemerintah Daerah untuk memperoleh hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dampak bahwa Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan meningkat secara signifikan akibat dari penerapan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bagian dari dana perimbangan, dimana sumbangan DAU terhadap APBD mencapai sebesar $\pm 87,78 \%$, sedangkan sisanya berasal dari sumbangan PAD terhadap APBD sebesar $5,26 \%$, bagi hasil pajak dan bukan pajak $3,93 \%$ serta sisa perhitungan $2,17 \%$. Namun apabila dilihat dari komposisi tersebut, sumbangan PAD terhadap APBD masih

rendah sehingga hal ini merupakan kelemahan dan salah satu penyebab keterbatasan keuangan daerah maupun terpenuhinya salah satu syarat Daerah Otonom sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.

b. Terbatasnya Kualitas SDM, Lapangan Kerja dan Jumlah Keluarga Miskin Yang Masih Tinggi ;

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan guna mencapai dan mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan adalah Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun kemampuan ekonominya. Mengingat manusia pada dasarnya merupakan titik sentral dari seluruh kegiatan pembangunan karena manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan.

Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam arti luas meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala individu maupun sosial yang akhirnya mampu menjadi sumber daya pembangunan secara komprehensif diantaranya haruslah memiliki kualitas pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, meningkatnya derajat kesehatan dan derajat kemampuan ekonomi. Dengan demikian terbatasnya kualitas SDM, lapangan kerja maupun jumlah keluarga miskin yang tinggi merupakan kelemahan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan, dimana jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan Tahun 2001 sebesar 257.802 orang, sedangkan pencari kerja dan yang belum tertampung sejumlah 23.393 orang.

c. Kondisi Geografis Yang Rawan Bencana Alam ;

Kabupaten Lamongan dengan luas 1.812,3 Km² yang dibelah menjadi dua bagian Bengawan Solo sepanjang 65 Km

50, 7 % dari luas daerah merupakan dataran rendah dan bonorowo serta bentuknya yang seperti baskom merupakan daerah yang rawan terhadap bencana banjir atau bencana tanah longsor sebagai akibat dari terjadinya bencana banjir.

d. Belum Terpenuhinya Tuntutan Masyarakat Yang Semakin Kompleks ;

Dalam Era Reformasi yang dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat serta mudahnya memperoleh informasi berbagai bidang, maka sangat berpengaruh terhadap adanya tuntutan publik yang semakin kompleks kepada Pemerintah Daerah, dimana tuntutan publik tersebut berupa peningkatan pelayanan publik yang murah cepat serta transparan. Oleh karena itu seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat dan tantangan persaingan bebas, maka dalam masa mendatang Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mengantisipasi dan mengembangkan bentuk-

bentuk pelayanan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

e. Terbatasnya Sarana dan Prasarana ;

Wilayah Kabupaten Lamongan yang cukup luas dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam sebagian besar merupakan dataran rendah yang terdiri dari lahan persawahan, rawa, waduk dan sebagian lagi berupa hutan, pantai lahan tambang dan lain-lain serta jumlah penduduk yang relatif besar.

Potensi tersebut belum sepenuhnya dapat didayagunakan secara optimal karena terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas

Faktor-faktor Eksternal yang bersifat positif, yang membantu Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapai atau mampu melampaui pencapaian sasarannya, hal ini bermakna Peluang (**Opportunities**).

Sedangkan Faktor-faktor Eksternal yang bersifat negatif, yang dapat menyebabkan organisasi gagal dalam mencapai sasarannya, hal ini bermakna Ancaman (**Threat**).

Adapun yang menjadi Peluang (**Opportunities**) dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, meliputi :

a. Terbukanya Pasar Global ;

Globalisasi merupakan perdagangan pasar bebas dunia suatu kenyataan yang pasti datang.

Perdagangan bebas pada era globalisasi akan berpeluang pada :

- 1) Terbukanya pasar dunia bagi produk-produk yang dihasilkan dari Kabupaten Lamongan.

- 2) Terbukanya pasar kerja dunia, bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.
- 3) Terbukanya akses informasi, baik ekonomi, teknologi maupun sosial budaya untuk dapat diakses dan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian, perdagangan bebas pada era globalisasi merupakan peluang bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lamongan.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Ke Arah Yang Positif ;

Perkembangan menunjukkan adanya Pertumbuhan Ekonomi Nasional kearah yang lebih baik. Hal tersebut nampak dari perkembangan tiga tahun terakhir bahwa pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur menuju kearah yang positif. Pada Tahun 2000 posisi pertumbuhan mencapai 4,9 %, sedikit mengalami perbaikan sejak terpuruk dari Tahun 1997. Tahun 2001 pertumbuhan ekonomi agak melemah sehingga turun mencapai 3,3 % dan diprediksi pada Tahun 2002 ini

pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami kenaikan sehingga mencapai sebesar 4 %.

Perkembangan pertumbuhan yang kondusif seperti ini menunjukkan bahwa roda perekonomian nasional banyak kearah positif, dengan demikian akan berimbas pada pertumbuhan di sektor perekonomian daerah yang sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan perkapita masyarakat.

c. Pesatnya Perkembangan IPTEK ;

Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan bagian dari komponen kualitas Sumber Daya Manusia. Indonesia masih menduduki urutan ke 60 dari 72 negara dalam mencapai Indeks Teknologi/IPT (Technology Achievement Index) yang merupakan unjuk keberhasilan di dalam menciptakan dan mendifusikan teknologi serta pengembangan kemampuan technology Sumber Daya Manusia. Dari urutan IPT tersebut menunjukkan ketertinggalan

kita di dalam menyerap dan mengakses teknologi yang ada. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peluang yang cukup lebar dan terbuka pada bidang penciptaan teknologi dan pendifusian inovasi baru serta hasil-hasil penelitian pengembangan (LITBANG) yang dapat diakses dan dikembangkan untuk menggarap potensi yang ada di Kabupaten Lamongan.

d. Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha ;

Kerjasama antar Daerah dan Dunia Usaha dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Letak Geografis.

Kerjasama antar Daerah dan Dunia Usaha sangat diperlukan guna mewujudkan pemerataan pembangunan,

kelestarian laju pembangunan antar daerah, antar sekitar dan menjang upaya mewujudkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas serta akses masyarakat kepada unit-unit produksi, pemasaran dan pelayanan sosial dasar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa potensi yang dapat dikerjasamakan antara lain Bidang Pekerjaan Umum, Pariwisata, Telematika, Kelautan dan lain-lain.

e. Adanya Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Dunia Usaha ;

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah merupakan peluang besar bagi daerah Kabupaten dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kabupaten memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya.

Disamping dituntut untuk berkreaitifitas, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menciptakan iklim yang kondusif

dan menarik bagi investor maupun dunia usaha lainnya. Demikian pula terhadap akses perangkat lunak berupa peraturan perundangan terkait investasi telah dilakukan penyederhanaan dalam rangka reformasi ekonomi dan untuk lebih meningkatkan arus investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing diantaranya dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor : 22 Tahun 1998, Tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis Dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal, Instruksi Presiden RI Nomor : 23 Tahun 1998, Tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip di Daerah serta Keputusan Presiden RI Nomor : 115 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Tata Cara Penanaman Modal.

Sedangkan yang menjadi Ancaman (**Threat**) Pemerintah Kabupaten Lamongan, meliputi :

a. Dampak Globalisasi ;

Globalisasi disamping membawa peluang, jika tidak arif dalam mengantisipasi juga merupakan ancaman, terutama akibat negatif yang dibawa globalisasi. Mengingat globalisasi memungkinkan arus barang, orang dan informasi tidak dapat dibendung lagi (borderless), maka akan terjadi :

- 1) Persaingan produk-produk/barang hasil produksi Kabupaten Lamongan dengan barang-barang dari luar, yang lebih kompetitif.
- 2) Persaingan Tenaga ahli/Tenaga kerja terdidik antara tenaga yang ada di Lamongan dengan tenaga-tenaga luar.
- 3) Perubahan Kehidupan idiologi, politik dan sosbud masyarakat akibat transformasi informasi yang mana akan berakibat pada kondisi masyarakat, bergesernya nilai-nilai masyarakat dan lain-lain.

b. Makin Ketatnya Standart Kualitas Produk ;

Dalam era globalisasi hubungan ekonomi antar negara tidak dibatasi dengan kepentingan-kepentingan domestik masing-masing negara sehingga perdagangan internasional akan dilaksanakan secara bebas dengan menyepakati berbagai instrumen perjanjian internasional tentang perdagangan bebas mulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asian Pasific Economic Cooperation Council (APEC) dan World Trade Organisation (WTO). Perdagangan bebas pada era globalisasi membawa implikasi semakin ketat dan kompetitifnya persaingan ekonomi produksi antar negara serta harus dihapusnya instrumen perdagangan yang bersifat protektif dan diskriminatif. Ketatnya persaingan perdagangan tersebut ditandai dengan adanya penetapan standart kualitas produk secara internasional dengan adanya sertifikasi ISO baik untuk kualitas produk maupun kualitas proses untuk menghasilkan produk tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila tidak segera diantisipasi kualitas produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten

Lamongan, maka akan semakin tidak diterimanya produksi masyarakat Kabupaten Lamongan di perdagangan internasional maupun nasional.

c. Rendahnya Minat Investor ;

Dampak krisis ekonomi yang terjadi sejak Tahun 1997 masih dirasakan meskipun saat ini mulai terjadi pertumbuhan ekonomi secara bertahap namun perkembangan investasi masih sangat lambat bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Rendahnya minat investasi ini disamping pengaruh kondisi ekonomi makro juga disebabkan faktor-faktor non ekonomi antara lain belum stabilnya keamanan , jaminan hukum, proses perijinan yang tidak jelas, terbatasnya informasi peluang investasi, terbatasnya infrastruktur pendukung, kurangnya respon masyarakat, ketatnya persaingan investasi antar wilayah dan lain-lain.

Rendahnya minat investasi ini berdampak pada kegiatan ekonomi mikro diberbagai sektor, karena itu perlu

segera diantisipasi dengan langkah penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

d. Belum Adanya Secara Menyeluruh Perundangan Sektoral ;

Berlakunya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, belum seluruhnya didukung dengan perundang-undangan sektoral. Hal ini masih menjadi kendala bagi daerah untuk melaksanakan kewenangan dimaksud khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Implikasi dari belum adanya dukungan perundang-undangan sektoral secara menyeluruh ini akan bermuara pada terbatasnya kemampuan menggali Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

e. Dominasi Pabrikan Dalam Menentukan Harga ;

Di bidang perdagangan komoditas, keterbukaan ekonomi nasional akan membuka pasar baik komoditas lokal maupun import, namun demikian yang menjadi masalah adalah dengan hadirnya pasokan dari luar sehingga produk lokal akan mengalami persaingan yang sangat ketat.

Terjadinya margin harga antara produk lokal dan produk import baik yang terkait aspek mutu, waktu dan harga sehingga konsumen mempunyai perbandingan dan menjadikan suatu ancaman bagi produk-produk lokal.

Dalam pemasaran produk agribisnis terdapat 3 (tiga) karakteristik yang membedakan dengan produk industri lain diantaranya : (1) Ketersediaannya (supplay) bersifat musiman, (2) Mudah rusak (perishable food) dan (3) Kualitas dan kuantitasnya bervariasi.

Oleh karenanya dalam persaingan pasar faktor harga menjadi penting disamping adanya kepekaan konsumen terhadap harga dan kualitas. Hal ini sebagai akibat dampak over

supply terhadap produk dan karakteristik produk agribisnis sehingga melemahnya posisi tawar dan harga relatif banyak ditentukan oleh pabrikan atau pengusaha besar.

Dengan memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonom dapat disampaikan Gambaran Hasil Analisis sebagai berikut :

1. Strategi SO

Adalah strategi menggunakan/mobilisasi kekuatan yang teredia untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan hasil sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan berlakunya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan terbukanya pasar global.

- b. Mengoptimalkan Lembaga-lembaga Perangkat Daerah dengan memanfaatkan pesatnya IPTEK untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha.
- c. Mendayagunakan pendapatan perkapita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- d. Mendayagunakan jumlah penduduk untuk meraih pasar global.
- e. Mengoptimalkan budaya masyarakat yang agamis, beretos kerja tinggi dan berpartisipasi serta adanya potensi daerah melalui deregulasi peraturan perundang-undangan dalam dunia usaha.

2. Strategi WO

Adalah strategi untuk menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keuangan daerah melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, memanfaatkan pasar global dan pertumbuhan ekonomi, pesatnya perkembangan IPTEK serta deregulasi perundang-undangan dunia usaha.

- b. Meningkatkan pemenuhan tuntutan masyarakat melalui kerjasama antar daerah, dunia usaha, perkembangan IPTEK dan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha.
- c. Meningkatkan kualitas SDM, lapangan kerja dan menurunkan jumlah keluarga miskin dengan memanfaatkan terbukanya pasar global, pertumbuhan ekonomi, pesatnya perkembangan IPTEK, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK serta kerjasama antar daerah dan dunia usaha.
- e. Mengantisipasi kondisi geografis rawan bencana alam dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK, Kerjasama antar daerah dan dunia usaha.

3. Strategi ST

Adalah strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada, atau mengubahnya menjadi peluang dengan hasil sebagai berikut :

- a. Mendayagunakan berlakunya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 untuk mengatasi rendahnya minat investor.
- b. Mendayagunakan lembaga-lembaga perangkat daerah dan jumlah penduduk untuk mengantisipasi dampak globalisasi.
- c. Mendayagunakan pendapatan perkapita untuk mengatasi dominasi pabrikan dalam menentukan harga.
- d. Mendayagunakan budaya masyarakat agamis yang beretos kerja tinggi dan partisipatif serta adanya potensi daerah untuk mengantisipasi dampak globalisasi dan ketatnya standart kualitas produk.
- e. Mendayagunakan lembaga-lembaga perangkat daerah dan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-undang

Nomor : 25 Tahun 1999 untuk mengatasi belum menyeluruhnya dukungan perundang-undangan sektoral.

4. Strategi WT

Adalah strategi yang memadukan antara kelemahan dan tantangan untuk memperkecil kelemahan yang ada dan sedapat mungkin menghindari tantangan yang ada dengan hasil sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan terbatasnya keuangan daerah untuk mengantisipasi dampak globalisasi dan rendahnya minat investor.
- b. Meningkatkan pemenuhan tuntutan masyarakat untuk mengantisipasi dampak globalisasi dan ketatnya standart kualitas produk serta dominasi pabrikan.
- c. Mengoptimalkan kualitas SDM, Meningkatkan lapangan kerja dan menurunkan keluarga miskin untuk mengantisipasi dampak globalisasi.

- d. Mengoptimalkan sarana dan parasarana untuk mengantisipasi dampak globalisasi, rendahnya minat investor dan belum menyeluruhnya dukungan perundang-undangan Sektoral.
- e. Mengatasi kondisi geografis yang rawan bencana guna mengantisipasi rendahnya minat investor.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan misi, dalam hal mana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lamongan menerima sukses atau kegagalan dari suatu misi organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategik yang lebih mudah untuk mengkomunikasikannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi pembangunan Kabupaten Lamongan dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa : Potensi, Peluang,

Kekuatan, Tantangan, Kendala dan Kelemahan yang dihadapi, termasuk : sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kegiatan-kegiatannya. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur Perencanaan Strategik sebelumnya (POLDAS, PROPEDA dan Pokok-pokok Reformasi).

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, meliputi :

- a. Mengoptimalkan berlakunya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan terbukanya pasar global;
- b. Meningkatkan keuangan daerah melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, memanfaatkan pasar global dan pertumbuhan ekonomi, pesatnya pertumbuhan IPTEK serta deregulasi perundang-undangan dunia usaha;

- c. Meningkatkan pemenuhan tuntutan masyarakat melalui kerjasama antar daerah, dunia usaha, perkembangan IPTEK dan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha;
- d. Meningkatkan kualitas SDM, Lapangan Kerja dan menurunkan jumlah keluarga miskin dengan memanfaatkan terbukanya pasar global, pertumbuhan ekonomi, pesatnya perkembangan IPTEK, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Penetapan tujuan ini didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mampu mencapai tujuan dan sasarnya.

Tujuan ini dirumuskan untuk **mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas** untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi tersebut.

Adapun tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- 1. *Terwujudnya peningkatan keuangan daerah melalui pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan mengoptimalkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.***
- 2. *Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, perkembangan IPTEK***

dan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha serta peningkatan kualitas SDM.

3. *Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan Otonomi Daerah dan memanfaatkan terbuka pasar global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan IPTEK.*

2. SASARAN

Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah. Adapun sasaran dalam LAKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.
4. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha.

5. Menerapkan perkembangan IPTEK.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
8. Memanfaatkan terbukanya pasar global.
9. Memanfaatkan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha.

C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan yang meliputi penetapan kebijaksanaan dan program.

1. KEBIJAKAN

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah ;
- b. Menggali dan mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah ;
- c. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, khususnya : pertanian, kelautan dan industri ;
- d. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan kehidupan beragama,

- membuka peluang lapangan kerja serta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat ;
- e. Menerapkan perkembangan IPTEK untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik industri penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah ;
 - f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan ;
 - g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis ;
 - h. Memanfaatkan terbukanya pasar global melalui pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja serta pengembangan perdagangan dan sistem distribusi ;
 - i. Memanfaatkan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dunia Usaha melalui Pengembangan Sistem Informasi.

2. PROGRAM

- a. Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah, melalui program :
 - 1) Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah ;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah ;
 - 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- b. Menggali dan Mengembangkan Sumber Pendapatan Daerah, melalui program :
 - 1) Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
 - 2) Pembinaan Kekayaan Daerah dan Perusahaan Daerah.

- c. Menggali Pemanfaatan dan Mengembangkan Potensi Daerah, melalui program :
 - 1) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Industri dan Kelautan ;
 - 2) Pembangunan dan Pengembangan Infra Struktur ;
 - 3) Pengolahan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

- d. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah, melalui program :
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pematapan Kehidupan beragama ;
 - 2) Pembinaan Tradisi dan Nilai-nilai Budaya.
- e. Menerapkan Perkembangan IPTEK Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik, melalui program :
 - 1) Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pengembangan Teknik Produksi ;
 - 2) Penelitian dan Pengkajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui program :
 - 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan ;
 - 2) Peningkatan Derajat Kesehatan dan Sosial ;
 - 3) Pendayagunaan dan Sistem Pengawasan.
- g. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, melalui program :
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Ekonomi ;

- 2) Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- h. Memanfaatkan Terbukanya Pasar Global, melalui program :
 - 1) Pembinaan, Pengembangan Produktifitas dan Kesempatan Kerja ;
 - 2) Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi.
 - i. Memanfaatkan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dunia Usaha, melalui program :
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

1. SEKTOR INDUSTRI

Pembangunan sektor industri berupaya mengembangkan unit-unit usaha di sektor industri menengah dan kecil yang produktif dan berdaya saing. Untuk mendukung keberhasilan tersebut pada tahun anggaran 2002 telah dialokasikan dana sebesar 4 milyar 849 juta 100 ribu rupiah untuk kegiatan-kegiatan pengembangan industri rumah tangga. Industri kecil dan menengah serta program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan hasil evaluasi kinerja kebijakan yakni menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, khususnya pertanian, kelautan dan industri dengan nilai capaian kelompok indikator kinerja kebijaksanaan sebesar 88,41 %.

2. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN

Pada sektor pertanian, kehutanan dan kelautan diarahkan pada sasaran meningkatkan produktivitas lahan melalui intensifikasi dan penggunaan teknologi tepat guna. Hal ini agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas serta harga jual produksi yang berarti meningkatkan Pendapatan masyarakat. Kegiatan pokok sektor pertanian dan kehutanan yaitu pembangunan keempat sub sektor secara terpadu disertai pengembangan sumberdaya, sarana dan prasarana. Untuk mendukung Program tersebut pada Tahun Anggaran 2002 dialokasikan dana sebesar Rp. 2 Milyar 877 juta 500 ribu rupiah.

Sektor Pertanian dan Kehutanan merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam menentukan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah khususnya pertanian, kelautan dan industri. Adapun

nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh adalah sebesar 88,41 %.

3. SEKTOR SUMBER DAYA AIR IRIGASI

Pembangunan sektor Sumber Daya Air dan Irigasi pada tahun 2002 telah diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur yang mendorong pemanfaatan dan pengembangan potensi pertanian melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggali memanfaatkan dan mengembangkan Pertanian.

Disamping itu pembangunan sumberdaya air dan irigasi di Kabupaten Lamongan juga dalam rangka mengupayakan sedemikian rupa agar Kabupaten Lamongan terbebas dari bahaya banjir, di mana sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lamongan dikenal selama ini pada musim hujan merupakan daerah banjir.

Sektor ini telah dianggarkan pada APBD 2002 sebesar 2 milyar 70 juta rupiah. Kegiatan Pokok Sektor ini adalah pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi yang digunakan untuk normalisasi

pengerukan dan perbaikan saluran air sebanyak 9 lokasi, bantuan perbaikan Dam 6 buah dan pembangunan pintu air 4 buah serta normalisasi waduk 6 buah.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah khususnya pertanian, kelautan dan industri dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh adalah sebesar 88,41 %.

4. SEKTOR TENAGA KERJA

Sektor Tenaga Kerja merupakan masalah yang mendasar karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Untuk itu kegiatan pembangunan disektor ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan pembinaan hubungan idustrial serta perlindungan tenaga kerja.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni memanfaatkan terbukanya pasar global melalui pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja serta pengembangan perdagangan dan sistim

distribusi dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh sebesar 83,09 %.

5. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI

Sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi merupakan sektor yang cukup penting dan strategis terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan.

Sektor ini dialokasikan dana sebesar 6 milyar 291 juta rupiah.

Sub sektor perdagangan diarahkan demi terciptanya efektifitas distribusi dan sistem pemasaran barang serta berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Kegiatan pokok sub sektor ini antara lain pelayanan informasi pasar, pembangunan pasar desa, pembangunan sarana dan prasarana pasar ikan Lamongan tahap satu, pembangunan jembatan penghubung antara pasar Lamongan baru dengan Lamongan Plasa, pembangunan pagar batas dan saluran air pasar hewan Babat dan rehabilitasi pasar Babat.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pariwisata usaha daerah dan lembaga keuangan daerah dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan diperoleh sebesar 84,55 %.

6. SEKTOR TRANSPORTASI

Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembangunan sektor transportasi yang terus berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dibidang transportasi. Melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi serta perhubungan diharapkan dapat meningkatkan sistem transportasi yang tertib, teratur aman dan nyaman dalam rangka memperlancar arus perekonomian dan percepatan tingkat pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sektor transportasi tahun anggaran 2002 dialokasikan

dana sebesar 19 milyar 555 juta 47 ribu rupiah yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin jalan sebanyak 29 ruas seluas kurang lebih 114.442 m²;
- b. Pemeliharaan berkala jalan sebanyak 1 ruas seluas 12.000 m² setara dengan 3 km ;
- c. Peningkatan jalan sebanyak 17 ruas dengan luas kurang lebih 152.189,3 m² setara dengan 38,05 km ;
- d. Pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 30 jembatan yang menyebar di 6 Kecamatan ;
- e. Pembangunan Jembatan Karangbinangun ;
- f. Penggantian jembatan sebanyak 8 jembatan yang menyebar di 7 Kecamatan ;
- g. Pembangunan tembok penahan tanah sepanjang 1.332 meter di 4 Kecamatan ;
- h. Perbaikan Lineman (jari-jari) jalan sepanjang 1.893 m² dan trotoar sepanjang 1.000 m² yang tersebar di 3 Kecamatan ;

- i. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan meliputi pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan penerangan areal parkir Pelabuhan Rakyat Sedayulawas Brondong.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, khususnya pertanian, kelautan dan industri dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan sebesar 88,41 %.

7. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pembangunan sektor pertambangan dan energi diarahkan untuk pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat, khususnya yang tidak terjangkau oleh PT. PLN (Persero).

Alokasi dana sektor ini pada tahun anggaran 2002 disediakan

sebesar 140 juta rupiah yang dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Pembinaan dan penyuluhan pengelolaan pertambangan, kegiatan ini dilaksanakan dilokasi pertambangan Paciran, Brondong, Solokuro, Babat, Ngimbang, Mantup dan Sambeng ;
- b. Pemberian bantuan biaya pengurusan SIPD kepada penambang skala kecil. Bantuan ini diberikan kepada 10 orang penambang skala kecil yang mengajukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bantuan biaya diberikan sebesar 2 juta rupiah setiap penambang yang digunakan untuk biaya pembuatan peta topografi serta biaya pembuatan dokumen UPL-UKL.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menerapkan perkembangan iptek untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik industri penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh adalah sebesar 90,22 %.

8. SEKTOR PARIWISATA DAN TELEMKOMUNIKASI

Potensi pariwisata di Kabupaten Lamongan cukup menjanjikan terhadap peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat dimasa mendatang. Guna mewujudkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2002 telah dilaksanakan program pengembangan wisata dengan alokasi anggaran sebesar 819 juta, yang diarahkan untuk kegiatan :

- a. Pengembangan obyek wisata Gua Maharani yang meliputi pembangunan 27 unit kios souvenir, dan rehabilitasi instalasi listrik ;
- b. Pembangunan sarana obyek wisata tanjung kodok berupa pembangunan Dermaga, tempat teduh dan landasan parkir ;
- c. Pembangunan obyek wisata waduk gondang berupa pembangunan jalan setapak, pembangunan tempat teduh dan kandang satwa.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menerapkan perkembangan iptek untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik industri penelitian dan pengkajian pendukung

perencanaan pembangunan daerah dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh adalah sebesar 90,22 %.

9. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN

Pelaksanaan sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman diarahkan pada peningkatan pengembangan infra struktur, sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pada sektor ini dialokasikan dana sebesar 11 milyar 792 juta 343 ribu 650 rupiah, meliputi kegiatan-kegiatan Pembangunan Daerah, Pembangunan Prasarana Perkotaan dan Desa. Pembangunan Prasarana perkotaan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan Tugu batas Kabupaten di 4 lokasi, Pembangunan dan pengadaan Sarana TPA 4 unit, Pemasangan LPJU Shodium di 9 ruas jalan dan Lampu-lampu hias sebanyak 2 unit.

Dalam rangka mendukung pembenahan wajah kota sebagaimana yang diarahkan oleh Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Kabupaten Lamongan, maka telah dibangun Rest Area di depan Stadion berupa 20 stand kios untuk pusat penjualan Souvenir dan makanan khas Lamongan, juga pembangunan ruang pameran dan sarana promosi produk industri kecil di Jalan Panglima Sudirman.

Disamping Pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah melaksanakan pengadaan dan pengurukan tanah untuk persiapan pembangunan Ruko di Jalan Panglima Sudirman (sebelah barat Patung Kadet Suwoko) dan pengurukan tanah di Jalan Jaksa Agung Suprpto (depan Dinas Perhubungan dan Pariwisata) dan Alhamdulillah pada tanggal 27 Pebruari 2003 yang lalu baik pembangunan Rest Area, Ruang Pamer dan Promosi Produk Unggulan serta Pembangunan Ruko tersebut telah diresmikan.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pedesaan diarahkan untuk

kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- a) Bantuan pembangunan Desa/Kelurahan sebanyak 474 Desa / Kelurahan ;
- b) Bantuan pembangunan prasarana Ronggo Hadi sebanyak 104 Desa ;
- c) Bantuan pemberdayaan lingkungan sebanyak 52 Desa.
Bantuan Gerdu Taskin 12 Desa.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, khususnya pertanian, kelautan dan industri dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan sebesar 88,41 %.

10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

Pembangunan sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang diarahkan untuk kelestarian lingkungan hidup serta terciptanya keselarasan antara lingkungan dan Masyarakat. Disamping itu juga diarahkan

untuk terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Guna mendukung keberhasilan sektor ini dalam APBD tahun 2002 telah dianggarkan dana sebesar 968 juta 500 ribu rupiah yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penghijauan dan Proyek Kali Bersih (PROKASIH) serta Pengendalian Pencemaran Limbah.

Hasil evaluasi kegiatan kebijaksanaan yakni menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah khususnya pertanian, kelautan dan industri dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan pembangunan desa sebesar 88,41 %.

11. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Sektor ini diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai kader penerus bangsa, yang beriman, bertaqwa dan beakhlak mulia serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna menunjang keberhasilan tersebut tahun anggaran 2002 telah dialokasikan dana sebesar 10 milyar 912 juta 163 ribu diarahkan pada kegiatan-kegiatan :

- a. Pembinaan pendidikan Dasar dengan kegiatan pokok antara lain perawatan dan operasional SD / MI dan TK, Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) dan bantuan penunjang pengadaan sarana dan prasarana SD / MI, TK / RA / BA ;
- b. Pembinaan Tenaga Pendidikan Menengah dengan kegiatan Rehabilitasi dan sarana dan prasarana serta pembangunan SLTP, SMU / SMK ;
- c. Pembinaan Tenaga Pendidikan dan kebudayaan dengan kegiatan Bantuan Kesejahteraan Guru TK dan guru swasta lingkup Departemen Agama ;
- d. Perpustakaan Keliling ;
- e. Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan

dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan dengan nilai capaian indikator kebijaksanaan yang diperoleh sebesar 92,32 %.

12. SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada akhir tahun 2001 sebesar 1.210.879 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk mencapai 0,90 %.

Alokasi anggaran untuk sektor kependudukan pada tahun 2002 sebesar 850 juta rupiah digunakan untuk kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat melalui system managemen administrasi kependudukan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik secara optimal dengan penerapan perkembangan kemajuan IPTEK.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni menerapkan perkembangan iptek untuk meningkatkan pelayanan publik melalui

penerapan teknik industri, penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan hasil nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh sebesar 90,22 %.

13. SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA

Pembangunan kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan Wanita Anak dan Remaja memiliki arti yang sangat strategis mengingat sektor ini sangat berkaitan langsung dengan kualitas sumberdaya manusia. Penanganan sektor ini harus dilakukan dengan lintas sektor dan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendukung sektor ini pada tahun anggaran 2002 telah dianggarkan dana sebesar 5 milyar 836 juta 270 ribu rupiah, dengan kegiatan pokok antara lain Penyuluhan Kesehatan masyarakat dan perbaikan Gizi masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dan rehabilitasi sosial, partisipasi sosial masyarakat, penanggulangan bencana alam

dan peningkatan peranan Wanita serta pembinaan Anak dan Remaja.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan. Dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan sebesar 92,32 %.

14. SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pelaksanaan Pembangunan sektor perumahan dan permukiman pada tahun 2002 diarahkan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan penyediaan serta Pengelolaan Air Bersih.

Sektor ini telah dianggarkan dana sebesar 2 milyar 372 juta 575 ribu rupiah diarahkan pada kegiatan-kegiatan :

- a. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman pedesaan berupa perbaikan jalan lingkungan desa sepanjang 4.447 meter ;

- b. Perbaikan perumahan dan pemukiman Perkotaan berupa pembangunan jalan sepanjang 5.348 meter ;
- c. Peningkatan lingkungan permukiman Pedesaan berupa Pembangunan saluran air sepanjang 402 meter dan gorong-gorong 1 unit ;
- d. Penyehatan lingkungan permukiman perkotaan berupa pembangunan saluran air sepanjang 2.745 meter dan gorong-gorong 1 unit ;
- e. Penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan berupa sistem pengelolaan air sederhana (SIPAS), menara air 2 unit dan perpipaan 7.518 meter serta pembangunan air bersih melalui Proyek WSSLIC sebanyak 20 lokasi.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh sebesar 92,32 %.

15. SEKTOR AGAMA

Pembangunan sektor agama di Kabupaten Lamongan ditekankan pada peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama dan pendidikan agama.

Dukungan dana APBD Tahun 2002 untuk sektor agama sebesar 1 milyar 180 juta untuk mendukung kegiatan pengembangan lembaga-lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah, bantuan kepada pondok pesantren dan bantuan pembinaan LPTQ.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni meningkatkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan kehidupan beragama, membuka peluang lapangan kerja serta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh sebesar 90,88 %.

16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan IPTEK memegang peranan kunci dan sangat mempengaruhi perkembangan dalam pembangunan tahap berikutnya. Disamping itu keberhasilan pembangunan bidang IPTEK sangat tergantung dengan manusia pengguna IPTEK tersebut, untuk itu pengembangan dan penerapan IPTEK harus didukung dengan SDM yang berkualitas.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni memanfaatkan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha melalui pengembangan sistem informasi dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebesar 88 %.

17. SEKTOR HUKUM

Mencermati pelaksanaan otonomi daerah yang digariskan dalam UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat daerah setempat.

Maka melihat hal demikian itu begitu pentingnya suatu produk hukum dalam rangka penggalan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengedepankan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis, dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh sebesar 88,05 %.

18. SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN

Pembangunan sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan diarahkan untuk mewujudkan Aparatur yang professional dan memiliki integritas yang mampu mendukung kelancaran tugas pemerintahan secara efektif, efisien dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Alokasi APBD untuk mendukung sektor ini sebesar 13 milyar 718 juta 364 ribu 500 rupiah.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan yang diperoleh sebesar 92,32 %.

19. SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA

MASSA

Pembangunan sektor Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Massa memiliki sasaran untuk mewujudkan tatanan kehidupan politik masyarakat yang demokratis, dinamis dan kooperatif, membuka kelancaran komunikasi dan keterisolasian wacana masyarakat khususnya dipedesaan yang jauh dari jangkauan informasi.

Untuk mendukung sektor ini telah dialokasikan dana sebesar 731 juta 775 ribu rupiah.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah dengan nilai capaian indikator kinerja kebijaksanaan sebesar 88,32 %.

20. SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pembangunan sektor keamanan dan ketertiban masyarakat diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis dengan nilai capaian indikator kinerja kegiatan keamanan sebesar 88,05 %.

B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Keterkaitan pencapaian kinerja kebijakan dan sasaran dengan tujuan dalam mewujudkan visi dan misi dalam rencana strategik Pemerintah Kab. Lamongan adalah sebagai berikut :

1. SEKTOR INDUSTRI

Kinerja kebijaksanaan pada sektor industri diarahkan pada pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah serta kegiatan peningkatan kemampuan teknologi industri. Jumlah industri baik formal maupun non formal yang terdapat di Kab. Lamongan pada tahun 2002 mencapai

rendahnya tingkat pengetahuan, ketrampilan dan pemanfaatan teknologi modern dari sebagian pengusaha kecil dan menengah serta adanya keterbatasan permodalan.

2. SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kinerja kebijaksanaan pada sektor pertanian, kehutanan dan kelautan diarahkan pada pembangunan pertanian rakyat terpadu, pengembangan sumberdaya, sarana dan prasarana pertanian, pengembangan usaha perkebunan, pembangunan peternakan rakyat terpadu dan pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana perikanan. Sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terutama komoditi padi mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya produksi padi dari 631 ribu 755 ton pada tahun 2001 menjadi 702 ribu 614 ton pada tahun 2002 (GKG) meningkat 11,22 %. Tercapainya sasaran produksi padi dikarenakan turunnya harga

komoditi udang windu sehingga petani sawah tambak banyak yang beralih menanam padi yang semula pola tanam ikan-ikan-ikan menjadi ikan-ikan-padi dengan demikian areal tanaman padi pada lahan sawah tambak bertambah.

Sedangkan komoditas polowijo terutama jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan. Tidak tercapainya sasaran produksi polowijo disamping disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak mendukung yaitu musim kemarau yang datang lebih awal, juga belum semua petani menggunakan benih unggul, murni dan bermutu (sertifikat) hal ini dikarenakan kekurangan modal.

Produksi tembakau virginia dan tembakau jawa dari tahun ketahun cenderung menurun, hal ini disebabkan disamping adanya kegiatan sosialisasi tentang pengurangan areal agar beralih kekomoditi unggulan juga adanya iklim usaha yang tidak mendukung.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun mendatang serta mengantisipasi terjadinya tanah longsor pada lahan-lahan kritis telah dikembangkan penanaman jati unggul sebanyak 300.000 batang yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di wilayah selatan. Dalam pelaksanaan penanaman jati unggul ini juga telah diberikan subsidi kepada para petani dengan nilai sebesar Rp. 2.500,00/batang dari harga jual Rp. 4.000,00/batang.

Upaya ini dimaksudkan pula sebagai langkah untuk mempromosikan produk kultur jaringan Jati Unggul Lamongan (JUL). Komoditi lain yang mempunyai prospek pasar seperti kapas, cabe jamu, mengkudu terus dikembangkan penanamannya.

Sub sektor perikanan juga mengalami peningkatan terutama produksi ikan tangkap/laut terjadi peningkatan dari 37.715 ton tahun 2001 menjadi 38.915 ton atau meningkat 3,18% pada tahun 2002. Meningkatnya produksi ikan tangkap ini adanya hasil

pembinaan teknis dan manajemen secara kontinyu, peningkatan fasilitas penangkapan ikan juga adanya upaya intensifikasi yang dilakukan olah nelayan serta didukung adanya peningkatan populasi ikan permukaan (ikan layang, tongkol, ikan kuningan dan lain-lain). Sedangkan penurunan produksi perikanan budi daya dan perairan umum disebabkan adanya kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya aktivitas budidaya maupun penangkapan ikan diperairan umum.

Demikian pula untuk perkembangan produksi peternakan pada tahun 2002 untuk ternak besar meningkat 0,89%, ternak kecil meningkat 0,16% dan unggas meningkat 3,0 % bila dibanding dengan tahun 2001, hal ini terjadi karena disamping konsistensi program pengembangan peternakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan peningkatan angka kelahiran dari hasil perkawinan suntik, juga mulai dirasakan adanya peningkatan nilai tambahan pendapatan sebagai usaha sampingan atau alternatif usaha yang dianggap potensial.

Beberapa masalah yang ditemui Sektor Pertanian dan Kehutanan antara lain adanya kemarau panjang dan hama penyakit yang menyerang komoditi pertanian, tingginya sarana produksi (pupuk dan pestisida) rendahnya harga produksi pertanian serta rusaknya habitat perikanan dan peternakan akibat pengelolaan yang tidak terkendali dan ramah lingkungan.

3. SEKTOR SUMBER DAYA AIR IRIGASI

Kinerja kebijaksanaan pada sektor sumberdaya dan irigasi diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Dalam pelaksanaan sektor ini masih ditemui kendala diantaranya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian dan peranan fungsi rawa.

Disamping dari anggaran APBD Kabupaten, perlu kiranya dilaporkan pada sidang dewan yang terhormat, bahwa Pemerintah Pusat mulai Tahun 2002 dalam rangka mengatasi bencana banjir dan pemanfaatan sumberdaya air di Kabupaten Lamongan telah membangun Bendung Gerak Babat (Babat

Barrage) yang diinterkoneksi dengan Rawa Jabung dan Sudetan (Flood Way) Sedayu Lawas yang diharapkan proyek ini selesai pada Tahun 2003.

4. SEKTOR TENAGA KERJA

Kinerja kebijaksanaan tenaga kerja diarahkan pada pelatihan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Alokasi anggaran sektor tenaga kerja sebesar 157 juta rupiah untuk kegiatan pelatihan dan peningkatan tenaga kerja, penyuluhan dan penyiapan tenaga kerja indonesia dan pembinaan serta pelaksanaan hubungan industrial serta pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Lamongan pada tahun 2002 sebanyak 722.628 orang, pencari kerja 240.876 orang, sementara itu jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Lamongan yang diberangkatkan untuk bekerja

diluar negeri sebanyak 58 orang, tujuan ke Malaysia sebanyak 54 orang dan ke Korea Selatan sebanyak 4 orang.

5. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI

Kinerja kebijaksanaan pada sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi diarahkan pengembang perdagangan dan industri, pembinaan dan pengembangan koperasi nenerimaan pendapatan daerah, pengembangan lembaga keuangan. Salah satu wujud keberhasilan sub sektor ini adalah meningkatnya nilai ekspor dari \$ 4.051.883 tahun 2001 menjadi \$ 4.784.528 pada tahun 2002 yang diikuti pula tingkat pergeseran dari usaha formal menjadi usaha informal yang ditandai dengan peningkatan perijinan usaha sebesar 33,58%.

Sub sektor perdagangan ini memberikan kontribusi terhadap PDRB tahun 2002 sebesar 18,59% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,59%. Peran sub sektor ini memberikan dampak positif

terhadap kegiatan sektor pertanian yang merupakan potensi andalan Kabupaten Lamongan.

Secara umum keberhasilan pembangunan sub sektor ini tidak lepas dari langkah-langkah pembinaan pedagang golongan ekonomi lemah dan sektor informal serta akan pentingnya SIUP dan TDP.

Sub sektor pengembangan daerah meliputi PD. Bank Pasar, PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya dan PDAM yang perkembangannya dapat saya sampaikan sebagai berikut :

- a. PD. Bank Pasar perkembangannya cukup menggembirakan baik ditinjau dari perkembangan asset, laba usaha maupun nasabahnya bila dibandingkan tahun 2001, hal ini memberikan gambaran semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PD. Bank Pasar. Demikian pula dengan meningkatnya jumlah nasabah dan nilai piutang memberikan gambaran bahwa PD. Bank Pasar semakin meningkat pelayanannya.

Rentabilitas atau kemampuan untuk mendapatkan laba terhadap modal disetor mencapai 40,10 % ini menggambarkan bahwa PD. Bank Pasar cukup profitable dalam mengelolah usaha perbankan.

- b. PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya merupakan perusahaan daerah yang relatif baru namun perkembangannya cukup berarti bila dilihat dari beberapa usaha yang telah dirintis antara lain meliputi usaha penyaluran pupuk anorganik, pakan udang, seragam sekolah dan usaha-usaha lain yang masih dalam proses pengkajian.

Penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 500.000.000,- cukup memberikan peluang bagi PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya untuk mengembangkan usahanya, terutama usaha-usaha yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas khususnya para petani seperti pakan udang dan pupuk anorganik, sehingga pada tahun 2002 mampu menghasilkan laba usaha sebesar Rp.

110.000.000,- dan meningkatkan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 25.250.000,- menjadi Rp.61.000.000,-

- c. PDAM Lamongan sampai saat ini belum dapat diharapkan sebagai perusahaan yang *profitable*, mengingat sampai saat ini dari sisi pendapatan belum mampu menutup biaya operasionalnya, namun demikian perkembangannya mengalami peningkatan dari sisi produksi air meningkat 25,90% dari 2.620.587 m³ pada tahun 2001 menjadi 3.299.404 m³ pada tahun 2002, distribusi air meningkat 27.62% dari 2.501.267 m³ pada tahun 2001 menjadi 3.192.317 m³ pada tahun 2002, dengan jumlah pelanggan sebesar 112.409 sambungan rumah. Upaya peningkatan produksi dan pengembangan jaringan sambungan rumah terus ditingkatkan melalui peningkatan sarana, prasarana dan efisiensi.

Sub sektor keuangan diarahkan untuk mendukung kegiatan penerimaan pendapatan daerah dan pengembangan keuangan dengan kegiatan pendataan ulang PBB dengan system managemen informasi obyek pajak (SISMIOP) dan peningkatan serta pengendalian keuangan Kas Daerah.

Wujud kegiatan ini dapat dilihat dari obyek wajib pajak meningkat dan target penerimaan PBB terealisasi 12 milyar 928 juta 157 ribu 976 rupiah 7 sen atau meningkat 118% dari target 10 milyar 880 juta 444 ribu rupiah sedangkan PAD meningkat 54,5% dibanding tahun 2001 dimana tahun 2001 sebesar 16,5 milyar menjadi 25,4 milyar pada tahun 2002.

Sub sektor koperasi dan usaha kecil menengah yang merupakan bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan terus dibina dan dikembangkan menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dalam mekanisme pasar dan sejajar dengan pelaku ekonomi yang lain. Usaha kecil dan usaha kecil mikro yang tidak memiliki potensi untuk berkembang

secara mandiri dimotivasi menyatukan diri dalam wadah koperasi, sedangkan usaha kecil yang memiliki potensi dikembangkan menjadi usaha menengah.

Pembinaan koperasi pada tahun 2002 mencakup pembinaan kelembagaan, penguatan modal, dan peningkatan akses pasar, yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan SDM pengurus dan anggota koperasi, bantuan modal ketahanan pangan, dan pemasaran beras merk Raja Sili. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya jumlah koperasi sehat sebesar 20% dari 50 koperasi pada tahun 2001 menjadi 60 koperasi pada tahun 2002. Meningkatnya modal sendiri dari 22 Milyar 374 Juta 494 Ribu Rupiah pada Tahun 2001 meningkat menjadi 26 Milyar 878 Juta 600 Ribu Rupiah pada Tahun 2002 atau naik 20,13 %, sedangkan volume usaha gerakkan koperasi meningkat 0,13 % dari 129 Milyar 894 Juta 487 Ribu Rupiah pada Tahun 2001 menjadi 130 Milyar 64 Juta 700 Ribu Rupiah pada Tahun 2002. Bila dilihat dari

peningkatan volume usaha dan modal sendiri kenaikannya relatif kecil, namun kenyataannya keberadaan koperasi dan PKM tetap mampu bertahan dan berkembang walaupun dalam situasi perekonomian yang belum stabil.

6. SEKTOR TRANSPORTASI

Kinerja kebijaksanaan pada sektor transportasi diarahkan pada Rekabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggalian jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan fasilitas lalu lintas jalan, pengembangan fasilitas pelabuhan laut dan pelayaran laut. Dengan selesainya pelaksanaan pembangunan pada sektor transportasi tahun anggaran 2002 ini maka kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan sebagai berikut :

- b. Kondisi jalan baik pada tahun 2001 sebesar 59,78 % meningkat menjadi 66,41 % pada tahun 2002 atau sepanjang 230.265 km ;

- c. Kondisi jalan sedang pada tahun 2001 sebesar 36,19% menurun menjadi 30,62 % pada tahun 2002 atau sepanjang 106.169 km ;
- d. Kondisi jalan rusak tinggal 2,97 % pada tahun 2002 dibanding tahun 2001 sebesar 3,93 % atau sepanjang 10,298 km ;
- e. Kondisi jembatan baik 87,5 % pada tahun 2002 dibanding tahun 2001 sebesar 86,11 % ;
- f. Kondisi jembatan rusak 12,5 % pada tahun 2002 dibanding tahun 2001 sebesar 13,89 %.

7. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

kinerja kebijaksanaan pada sektor pertambangan energi diarahkan pada pembangunan dan penembangan pertambangan rakyat, penembangan listrik pedesaan. Pemberian bantuan ini sangat membantu penambang skala kecil dalam mengajukan ijin penambangan, mengingat kendala yang dihadapi para penambang dalam memperoleh ijin adalah besarnya biaya yang

harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan SIPD, disamping prosesnya yang masih memerlukan waktu yang relatif lama karena kewenangan pemberian SIPD masih berada pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Sub sektor pengembangan listrik pedesaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas perekonomian dipedesaan, utamanya masyarakat pedesaan yang belum mendapatkan pelayanan energi listrik dari PLN.

Wujud dari program ini meliputi bantuan PLTD kepada Dusun Seजार Desa Payaman Solokuro dan dusun Karon Desa Mojodadi Kecamatan Sambeng masing-masing 1 unit. Program ini juga didukung bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur berupa PLTS sebanyak 10 unit yang diarahkan ke Desa Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring.

8. SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI

Kinerja kebijaksanaan pada sektor pariwisata dan telekomunikasi diarahkan pada pengembangan pariwisata. Berkaitan dengan

jumlah wisatawan yang mengunjungi obyek-obyek wisata di Kabupaten Lamongan tahun 2002 sebanyak 823.486 orang mengalami penurunan dibanding tahun 2001 yaitu sebesar 846.311 orang.

9. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN

Kinerja kebijaksanaan pada sektor pembangunan daerah dan pemukiman diarahkan pada pembangunan sarana perkotaan, pembangunan dan pengembangan daerah tingkat II. Dengan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Desa/Kelurahan tersebut maka sebagai salah satu wujud nyata dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun Desanya melalui Swadaya sebagai pendamping bantuan dari Kabupaten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2001 swadaya dari masyarakat sebesar 3 milyar 803 juta 105 ribu dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 5 milyar 671 juta 293 ribu rupiah.

Disamping itu juga nampak adanya peningkatan kegiatan ekonomi, akibat adanya penerangan-penerangan jalan yang sebelumnya nampak sepi.

10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

Kinerja kebijaksanaan pada sektor lingkungan hidup dan tata ruang diarahkan pada pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang. Kegiatan Penghijauan tahun 2002 sebagian besar diarahkan untuk memperindah jalan arteri Deket – Babat berupa penanaman pohon palem, glodokan tiang dan tanaman hias lainnya.

Program Penataan Ruang diarahkan untuk kegiatan Penyusunan RUTRK dan RDTRK Ibu Kota Kecamatan Kembangbahu, Bluluk dan Laren. Penyusunan RTRK Lamongan dan DED pasar ikan, Visualisasi LAND USE jalan Deket – Lamongan – Babat, Perencanaan dan Penataan jalan tembus wilayah Babat Selatan serta Penyusunan dan Penataan Wajah kota Lamongan.

Dampak dari kegiatan –kegiatan tersebut akan mendukung Pemerintah Kabupaten dalam mempromosikan Lamongan kepada Investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan baik Daerah maupun Masyarakat.

11. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Kinerja kebijaksanaan sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa diarahkan pada pembinaan pendidikan dasar, pembinaan pendidikan menengah, tenaga pendidik, kebudayaan pembinaan kebahasaan, kesusilaan dan kepustakaan, pembinaan dan pengembangan generasi muda, pembangunan keolahragaan. Kondisi pendidikan sampai dengan tahun 2002 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2001 jumlah penduduk yang masih buta huruf sebanyak 20.567 jiwa, sedangkan pada tahun 2002 tinggal 20.517 jiwa. Apabila dibanding dengan jumlah penduduk

Kabupaten Lamongan sebanyak 1.221.750 jiwa, maka masih ada 1,67 % penduduk yang masih buta huruf ;

- b. Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 128.886 jiwa, sedangkan yang masuk sekolah SD/MI sebanyak 128.564 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi SD/MI cukup tinggi yaitu sebesar 99,75 % ;
- c. Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun sebanyak 61.950 jiwa, sedangkan yang sekolah SLTP/MTs sebanyak 46.279 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi SLTP/MTs yang cukup signifikan yaitu sebesar 74,70 % ;
- d. Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun sebanyak 67.762 jiwa, sedangkan yang masuk sekolah SMU/SMK/MA sebanyak 26.942 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi SMU/SMK/MA sebesar 39,75 %.

Untuk memenuhi tenaga siap pakai dan meningkatkan profesionalisme guru, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu dengan ITS dalam

program D1 Informatika, UNAIR program D1 Akutansi dan dengan UNESA program D2 PGTK dan PGSD. Program ini telah membantu mahasiswa baik dalam segi waktu maupun materi karena pelaksanaannya diadakan di Kabupaten Lamongan.

Di sektor ini juga telah dilaksanakan kegiatan perpustakaan keliling dengan sasaran kepada masyarakat pedesaan, pelajar dipedesaan, pondok pesantren dan rumah tahanan di Wilayah Kabupaten Lamongan. Sehingga sasaran yang telah dicapai mampu meningkatkan minat baca pengetahuan dan ketrampilan serta menambah wawasan para pelajar dan masyarakat.

12. SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Kinerja kebijaksanaan sektor kependudukan dan keluarga sejahtera diarahkan pada kependudukan, pengarahannya dan pembinaan transmigrasi. Wujud dari program ini telah diadakannya pengembangan komputer simduk di 5 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Paciran, melayani 4 Kecamatan yaitu Paciran, Laren, Brondong dan Solokuro ;
- b. Kecamatan Babat, melayani 4 Kecamatan yaitu Babat, Kedungpring, Modo dan Sugio ;
- c. Kecamatan Sukodadi, melayani 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukodadi, Karanggeneng, Kalitengah, Pucuk, Sekaran dan Maduran ;
- d. Kecamatan Karangbinangun melayani 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Karangbinangun dan Glagah ;
- e. Kecamatan Ngimbang melayani 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Sambeng.

Sedangkan untuk Kecamatan Lamongan, Tikung, Deket, Kembangbahu, Sarirejo, Turi dan Mantup tetap dilayani di Induk (Lamongan Kota).

13. SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA

Kinerja kebijaksanaan kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja diarahkan pada penyuluhan kesehatan masyarakat dan perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dan rehabilitasi sosial, partisipasi sosisi masyarakat, penanggulangan bencana alam, peningkatan perana wanita dan PKK, pembinaan anak remaja. Jangkauan pelayanan kesehatan melalui kunjungan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas tahun 2002 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2001. Jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2002 meningkat dari 638.008 orang pada tahun 2001 menjadi 647.670 orang pada tahun 2002. Sedangkan jumlah kunjungan rawat inap di Puskesmas meningkat dari 8.052 orang tahun 2001 menjadi 8.386 orang tahun 2002 dan pelayanan UGD meningkat dari 1.157 kasus menjadi 5.743 kasus.

Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat seiring dengan upaya Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik mutu maupun jangkauan, walaupun bermunculan balai pengobatan maupun klinik swasta sebagai mitra kerja.

Pada Tahun 2002 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat 1,93 % dibanding tahun 2001. Dimana tahun 2001 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 18.650 persalinan (86,77 %) dari sasaran persalinan sebanyak 21.492 persalinan, sedangkan pada tahun 2002 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 18.273 persalinan (88,70 %) dari sasaran persalinan sebanyak 20.601 persalinan.

Terhadap kematian perinatal (0 – 7 hari) pada tahun 2001 sebanyak 121 bayi (6,29 permil) dari 19.248 kelahiran hidup dan

pada tahun 2002 menurun menjadi 95 bayi (4,86 permil) dari 19.547 kelahiran hidup sehingga ada penurunan 1,43 permil.

Jangkauan pelayanan melalui RSUD rawat jalan meningkat dari 42.348 orang tahun 2001 menjadi 44.820 tahun 2002, sedangkan rawat inap tahun 2002 sebanyak 4.900 meningkat dibanding tahun 2001 hanya 3.931 orang. Pelayanan rujukan dari bawah mengalami peningkatan sebesar 2.584 kasus (25%) bila dibandingkan tahun 2001. Hal ini disebabkan disamping adanya peningkatan koordinasi antara Puskesmas dan RSUD. Juga adanya perbaikan manajemen serta perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana.

Dari kondisi tersebut, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini diindikasikan oleh adanya usia harapan hidup yang mengalami peningkatan sebesar 1,7 tahun dalam periode 1996 – 2002 di mana tahun 1996 usia harapan hidup sebesar 64,8 tahun menjadi 66.5 tahun pada tahun 2002.

Kegiatan Sub Sektor kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah :

- a. Rehabilitasi dan Penyantunan Penyandang Cacat dengan memberikan bantuan kepada 10 anak penyandang cacat dan 25 orang penderita kusta berupa peralatan mesin jahit dan kambing ;
- b. Penyantunan lanjut Usia dan Fakir Miskin, sebanyak 120 KK
- c. Bantuan Kepedulian Sosial kepada 4 buah panti sosial ;
- d. Penanggulangan bencana Banjir dengan memberikan bantuan sebanyak 47 KK di 6 Kecamatan ;
- e. Peberdayaan Perempuan dan P2WKSS ;
- f. Bantuan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Usia sekolah yang tidak mampu.

14. SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dampak dari pembangunan disektor perumahan dan permukiman telah terpenuhinya kebutuhan air bersih sebanyak 651 KK yang tersebar di 6 desa dan meningkatkan kebersihan serta

mengurangi kekumuhan sebanyak 13 lingkungan yang menyebar di 6 desa dan 7 Kelurahan.

15. SEKTOR AGAMA

Bantuan untuk masjid sebanyak 169 buah, musholah 46 buah, TPQ/TPA 27 lembaga, pondok pesantren 95 lembaga, MI 26 lembaga, MTS 4 lembaga dan panti asuhan sebanyak 1 lembaga.

Disamping itu juga diberikan bantuan kepada MUI dan untuk kegiatan safari ramadlon.

Bantuan pembinaan LPTQ dimaksudkan untuk penjaringan/seleksi bibit cabang MTQ , pembinaan MTQ dan pengiriman kafila MTQ Kabupaten Lamongan ke tingkat propinsi. Wujud dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta terwujudnya kerukunan umat beragama yang pada gilirannya dapat mengurangi berbagai tindak kriminal serta yang lebih penting adalah terciptanya masyarakat Lamongan yang berakhlak mulia.

16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Kinerja kebijaksanaan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada penelitian pendukung perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengembangan sistem informasi. Alokasi anggaran untuk sektor ini sebesar 873 juta untuk kegiatan Study Penelitian Budaya Udang Windu, Penyusunan Repetada 2003, Sosialisasi Poldas dan Propeda, Metodologi Penelitian Bagi Calon Peneliti, Lamongan dalam Angka dan IPM, Penghitungan PDRB, FS Rencana Pembangunan Pasar Ikan Lamongan, FS Rencana Pembangunan Kawasan Industri Pantura dan Penyusunan Master Plan Sistem Transportasi Jalan serta Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan telah mampu mendukung kelancaran pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan, sehingga tercipta adanya dokumen-dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Namun

untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal perlu adanya peningkatan SDM peneliti dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

17. SEKTOR HUKUM

Kinerja kebijaksanaan sektor hukum diarahkan pada perencanaan dan pembentukan hukum, penyuluhan hukum. Alokasi anggaran sektor ini sebesar 225 juta rupiah telah dimanfaatkan untuk Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Peraturan Keputusan Daerah, Pengembangan Bahan Dokumen Hukum, Sosialisasi Produk Perundang-undangan, Penegakan Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum serta pembinaan Peraturan Daerah.

Wujud Produk Hukum meliputi Peraturan Daerah 16 buah, Keputusan Bupati yang bersifat mengatur 34 buah, Keputusan Bupati yang bersifat menetapkan 629 buah, Instruksi Bupati 5 buah, MOU 4 buah dan Perjanjian Kerja Sama 8 buah.

Advokasi/bantuan Hukum telah dilaksanakan antara lain dalam rangka penyelesaian perkara Rencana Pembangunan Pasar Wisata Brondong, Tanah Kas Desa Sumosari, Tanah Kas Desa Glagah, Rawasekaran dan Proyek Ketahanan Pangan.

Seluruh program kegiatan pada sektor Hukum telah dilaksanakan dengan memprioritaskan proses pemahaman Hukum kepada masyarakat serta lebih memantapkan Kegiatan Jaringan Informasi Hukum melalui saling tukar informasi Hukum antar Kabupaten/Kota dan upaya penertiban dan penataan dokumentasi Hukum untuk kepentingan proses pembuatan produk-produk hukum yang lebih berkualitas.

18. SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN

Kinerja kebijaksanaan sektor pemerintah dan pengawasan diarahkan pada pendidikan dan pelatihan aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan efisiensi dan perdagangan aparatur, perdagangan sistem dan pengawasan.

Untuk menunjang berbagai Kegiatan antara lain : Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur pemerintah, Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur serta pendidikan dan pelatihan Aparatur dan Pendayagunaan Sistem Pengawasan.

Kegiatan pada sektor ini diantaranya :

- a. Pembangunan Baru dan Rehab Gedung / Kantor / Rumah Dinas sebanyak 10 unit dan Pembangunan pagar / pavingstone halaman, kantor / Pos jaga 4 unit.
- b. Penyediaan sarana perkantoran / transportasi / inventarisasi kekayaan milik pemerintah daerah berupa pembeian alat berat 3 unit, mobil pemadam kebakaran 1 unit, mobil roda empat 15 unit, sepeda motor 52 unit, truck 1 unit, komputer 26 unit, pengadaan dan proses pensertifikatan tanah pemda sebanyak 12 bidang, perlengkapan ruang dinas camat 27 unit.
- c. Pendidikan dan pelatihan aparatur yang diarahkan untuk Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan baik Tingkat IV, III dan II, Diklat Manajemen dan Diklat Teknis.

d. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah dengan kegiatan akuisisi arsip orde baru, pengendalian pembangunan daerah, manajemen pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan E-Goverment Kabupaten Lamongan.

19. SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

Kinerja kebijaksanaan sektor politik, penerangan, komunikasi dan media massa diarahkan pada pembinaan politik daerah, pengembangan operasi penerangan, pembinaan dan pengembangan pers di daerah. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2002 antara lain Peningkatan konsultasi Masyarakat dibidang HAM, fasilitasi komunikasi dan konsultasi LSM, Ormas, Organisasi Pemuda dan Parpol Pembinaan politik Dalam Negeri, Penertiban Organisasi, Pelatihan Kelompok Informasi, Pengadaan sarana dan prasarana RKPD dan pembinaan Kehumasan.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, diharapkan kondisi politik masyarakat di kabupaten Lamongan cukup stabil, aplikasi HAM dapat berjalan dan penyebaran Informasi khususnya kepada masyarakat pedesaan lebih cepat dan terarah.

20. SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kinerja kebijaksanaan sektor keamanan dan ketertiban umum diarahkan pada pembinaan kekuatan rakyat. Pada sektor ini telah dialokasikan dana APBD sebesar 102 juta 500 ribu rupiah yang dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kemampuan LINMAS dan pengadaan peralatan serta perlengkapan instruksi LINMAS.

C. ASPEK KEUANGAN

**DAFTAR : REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2002**

I. PENERIMAAN

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI
1	2	3	4
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	24,603,199,000.00	24,603,199,756.01
	a. Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu	24,603,199,000.00	24,603,199,756.01
II	BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21,085,005,700.00	25,453,445,082.39
	a. Pos Pajak Daerah	4,840,000,000.00	5,963,891,664.00
	b. pos Rettribusi Daerah	7,042,841,500.00	7,406,789,883.32
	c. Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	325,500,000.00	326,000,000.00
	d. pos Lain-2 Pendapatan Asli Drh Yg Sah	8,876,664,200.00	11,756,763,535.07
III	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	279,841,091,730.00	280,662,714,161.49
	a. Pos Bagi Hasil Pajak	14,976,468,000.00	16,449,838,270.07
	b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	2,154,623,730.00	1,502,875,891.42
	c. Pos Dana Alokasi Umum	262,710,000,000.00	262,710,000,000.00
	d. Pos Dana Alokasi Khusus	-	-
IV	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	-	-
	a. Pos Pinjaman Dalam Negeri	-	-
V	BAG. LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	9,461,000,000.00	15,081,514,796.70
	a. Penerimaan dari Pemerintah	2,260,000,000.00	3,649,393,750.00
	b. Penerimaan dari Propinsi	7,201,000,000.00	11,409,377,782.70
	c. Pos Penerimaan Lain-lainnya	-	22,743,264.00
JUMLAH		334,990,296,430.00	345,800,873,796.59
BAG. URUSAN KAS & PERHITUNGNAN		26,213,889,000.00	24,868,971,843.00
JUMLAH + BAGIAN UKP		361,204,185,430.00	370,669,845,639.59

B. SISI BELANJA

NO.	URAIAN	RENCANA	RELISASI
1	2	3	4
I	BELANJA RUTIN	248,669,158,280.00	220,786,459,705.00
	A. BELANJA ADMINISTRASI UMUM		
	1. Belanja Pegawai	204,533,548,950.00	177,845,583,646.00
	2. Belanja Barang	16,578,655,350.00	16,431,579,349.00
	3. Belanja Pemeliharaan	2,766,651,400.00	2,739,848,479.00
	4. Belanja Perjalanan Dinas	1,566,012,000.00	1,556,447,000.00
	5. Belanja Lain	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
	6. Angsuran Pinjaman/Hutang & Bunga	94,000,000.00	92,484,900.00
	7. Bantuan Keuangan	1,798,664,000.00	1,666,528,981.00
	8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1,667,551,000.00	1,666,376,000.00
	9. Pengeluaran Tidak Tersangka	3,153,277,580.00	2,302,399,000.00
	B. Operasional & Pemeliharaan sarana & Prasarana Pelayanan Umum Drh	1,510,762,000.00	1,485,212,350.00
II	BELANJA PEMBANGUNAN	86,321,138,150.00	85,303,380,322.00
	1. Sektor Industri	4,849,100,000.00	4,833,155,000.00
	2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	2,877,500,000.00	2,876,725,000.00
	3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	2,070,000,000.00	2,056,512,000.00
	4. Sektor Tenaga Kerja	157,000,000.00	157,000,000.00
	5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah	6,291,000,000.00	6,289,726,000.00
	6. Sektor Transportasi	19,555,047,000.00	19,455,768,140.00
	7. Sektor Pertambangan dan Energi	140,000,000.00	140,000,000.00
	8. Sektor Pariwisata dan telekomunikasi	819,000,000.00	817,359,000.00
	9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	11,792,343,650.00	11,317,710,700.00

NO. 1	URAIAN 2	RENCANA 3	RELISASI 4
	10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	968,500,000.00	963,921,000.00
	11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	10,912,163,000.00	10,903,737,350.00
	12. Sektor Kependudukan keluarga Sejahtera	850,000,000.00	850,000,000.00
	13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita, Anak dan Remaja	5,836,270,000.00	5,807,011,899.00
	14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	2,372,575,000.00	2,356,914,776.00
	15. Sektor Agama	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00
	16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	873,000,000.00	872,265,000.00
	17. Sektor Hukum	225,000,000.00	225,000,000.00
	18. Sektor Aparatur Pemerintahan & Pengawasan	13,718,364,500.00	13,366,724,457.00
	19. Sektor Politik, Penerangan, komunikasi Media Massa	731,775,000.00	731,575,000.00
	20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	102,500,000.00	102,275,000.00
	JUMLAH	334,969,296,430.00	306,089,840,027.00
	BAG. URUSAN KAS & PERHITUNGAN	26,213,889,000.00	24,384,188,314.00
	JUMLAH + BAGIAN UKP	361,204,185,430.00	330,474,028,341.00

*) Sumber Data : Bagian Keuangan Setda Kab. Lamongan

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KABUPATEN LAMONGAN 2002**

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	:	3,371,576,000,000.00
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)	:	1,187,707,000,000.00
3. Inflasi PDRB (%)	:	4.79
4. Laju Pertumbuhan (%)	:	3.18
5. Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	:	1,189,459
6. Income Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	:	2,689,417.00
7. Income Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)	:	947,403.00
8. Indek Pembangunan Manusia	:	64.57
9. Angka Harapan Hidup (Tahun)	:	66.50

*) Sumber Data BPS dan BAPPEDA Kabupaten Lamongan



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban Bupati Lamongan terhadap hasil penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan keuangan daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengoptimalkan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai tolok ukur keberhasilan tersebut telah ditetapkan melalui pencapaian PAD sebesar 21 milyar 80 juta.

Hasil pencapaian realitas PAD tahun 2002 sebesar 25 milyar 453 juta 445 ribu 82 rupiah 39 sen, dengan demikian tujuan sebagaimana Renstra yaitu peningkatan keuangan daerah pada tahun 2002 telah terpenuhi ;

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan dunia usaha, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai tolok ukur keberhasilan tersebut telah ditetapkan melalui :

a. Peningkatan pelayanan pendidikan :

- 1) Pemberantasan buta huruf tahun 2002 ditetapkan masih tersisa 1,72 % dari jumlah penduduk Kabupaten Lamongan
- 2) Angka partisipasi pendidikan tahun 2002 untuk SD/MI ditetapkan sebesar 99,75 %, SLTP/MTs 74,7 %, sedangkan SMU/SMK/MA sebesar 39,7 %

Hasil yang telah dicapai :

- 1) Penurunan angka buta huruf dari 20.567 jiwa pada tahun 2001 menjadi 20.517 jiwa pada tahun 2002, atau 1,67 % terhadap total penduduk Kabupaten Lamongan yaitu sebesar 1.221.750 jiwa.
- 2) - Angka partisipasi SD/MI sebesar 99,75 %, hal ini sesuai dengan adanya jumlah anak usia sekolah umur 7 – 12 tahun sejumlah 128.886 jiwa yang masuk sekolah SD/MI sejumlah 128.564 jiwa.
- Angka partisipasi SLTP/MTs sebesar 74,70 %, hal ini sesuai dengan jumlah anak usia sekolah 13 – 15 tahun sejumlah 61.950 jiwa yang masuk selokal SLTP/MTs sebanyak 46.279 jiwa.
- Angka partisipasi SMU/SMK/MA sebesar 39,75 %, hal ini sesuai dengan jumlah anak usia 16 – 18 tahun

sejumlah 67.762 jiwa yang masuk sekolah SMU/SMK/MA sejumlah 26.942 jiwa.

Dengan demikian tujuan peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui pelayanan pendidikan pada tahun 2002 telah terpenuhi.

b. Peningkatan pelayanan kesehatan :

- 1) Persalinan oleh tenaga medis ditetapkan tahun 2002 mencapai 75 % dari total persalinan di Kabupaten Lamongan
- 2) Kematian perinatal (0 - 7 hari) tahun 2002 bisa ditekan sampai dengan 10 per mil dari jumlah kelahiran
- 3) Sedangkan usia harapan hidup tahun 2002 diharapkan dapat mencapai 63 tahun

Hasil yang telah dicapai :

- 1) Jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebesar 88,70 % atau sebanyak 18.273 persalinan dari sasaran persalinan sebanyak 20.601 persalinan.
- 2) Jumlah kematian perinatal (0-7 hari) sebesar 4,86 per mil atau sebanyak 95 bayi dari 19.547 kelahiran hidup.
- 3) Usia harapan hidup mencapai 66,5 tahun.

Dengan demikian tujuan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2002 telah terpenuhi.

3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan Otonomi Daerah dan memanfaatkan terbukanya pasar global, kerjasama antar daerah dan dunia usaha serta pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebagai tolok ukur keberhasilan telah ditetapkan melalui :
 - a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 diharapkan dapat mencapai 3,14 %
 - b. Pendapatan perkapita penduduk tahun 2002 diharapkan dapat mencapai berkisar 2 juta 669 ribu 870 rupiah
 - c. Sedangkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2002 dapat mencapai 64,50 %

Hasil yang dicapai :

- a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sebesar 3,18 % sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku 3 trilyun 371 milyar 576 juta rupiah.
- b. Pendapatan perkapita tercapai 2 juta 689 ribu 417 rupiah.
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai 64,57

Dengan demikian tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 telah terpenuhi.

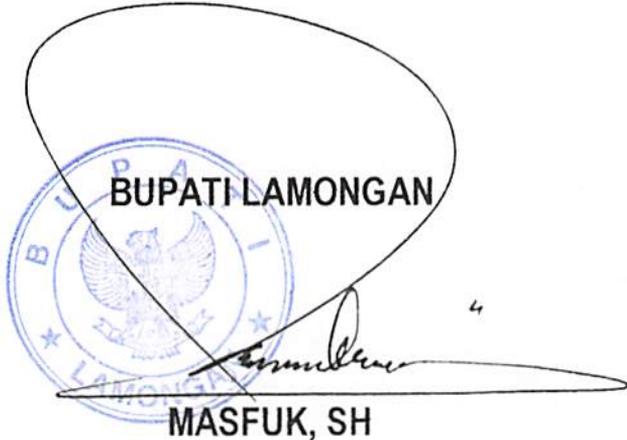
Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lamongan Tahun 2002 – 2006 beserta Tolok Ukurnya, telah diupayakan semaksimal mungkin pelaksanaannya

sebagaimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bupati Lamongan Tahun Anggaran 2002 ini.

Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



The image shows a blue circular official stamp of the Bupati of Lamongan. The stamp features a central emblem with a bird and the text "BUPATI LAMONGAN" around the perimeter. A large, loopy handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "MASFUK, SH" is printed in black capital letters.

RENCANA STRATEGIK - 1

Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun : 2002

FORMULIR PS-1

No.	Bidang/Sektor Sub. Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategik	Rencana Staregik Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 (tahun ke 1 dari 5 tahun)							Ket																																																
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai Tujuan/Sasaran																																																			
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)																																																
1.	Bidang Hukum	1. Membangun Sistem Politik Yang Demokratis serta Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan.	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamongan Yang Sejahtera, Maju, Rukun, Damai, Adil dan Berakhlak Mulia.	1. Perwujudan Keharmonisan Masyarakat Yang Didukung Dengan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Kehidupan Sehari-hari.	1. Terwujudnya Peningkatan Keuangan Daerah Melalui Otonomi Daerah, dengan Mengoptimalkan Penggalian dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah. 1. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	1. Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah; 2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah; 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pembinaan Politik Daerah. 1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.																																																	
2.	Bidang Ekonomi	2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan Yang Baik.		2. Perwujudan Kecerdasan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan.							2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah;	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.																																											
3.	Bidang Politik	3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan.		3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Hasil Pertanian, Kelautan dan Industri.													2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.																																					
4.	Bidang Agama	4. Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Ketahanan		4. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh																			2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.																															
5.	Bidang Pendidikan																												2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.																									
6.	Bidang Sosial																																		2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.																			
7.	Bidang Budaya																																								2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.													
8.	Bidang Pemb. Daerah																																														2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.							
9.	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																																																				2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.	
10.	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi																																																									
	Bidang Keamanan dan Ketertiban			2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	2. Menggali dan Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Khususnya Pariwisata, Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	1. Pengembangan Pariwisata. 2. Penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Penyertaan Modal Pemerintah.																																																		

No.	Bidang/Sektor Sub. Sektor	Kebijakan Nasional Strategik	Rencana Staregik Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 (tahun ke 1 dari 5 tahun)							Ket
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai Tujuan/Sasaran			
							Kebijakan	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Budaya. 5. Meningkatkan Pembangunan Daerah.		<p>Kekuatan Ekonomi Utamanya Bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Dengan Mengembangkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Mekanisme Pasar.</p> <p>5. Peningkatan Keseimbangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Yang Berkeprbedaan Dinamis, Kreatif dan Berdaya Tahan Terhadap Pengaruh Negatif Globalisasi.</p> <p>6. Peningkatan Kualitas Keseimbangan Pelayanan Masyarakat Melalui</p>		3. Menggali, Memanfaatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.	<p>1. Menggali, Memanfaatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah, Khususnya Pertanian, Kelautan dan Industri</p>	<p>1. Pembangunan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Industri dan Kelautan;</p> <p>2. Pembangunan dan Pengembangan Infra Struktur;</p>	<p>1. Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.</p> <p>2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.</p> <p>3. Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu.</p> <p>4. Pengembangan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Pertanian.</p> <p>5. Pengembangan Usaha Perkebunan.</p> <p>6. Pembangunan Peternakan Rakyat Terpadu.</p> <p>7. Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perikanan.</p> <p>1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi .</p> <p>2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.</p> <p>3. Peningkatan Jalan dan Penggantian jembatan.</p> <p>4. Pembangunan Jalan dan Jembatan .</p> <p>5. Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan.</p>	

No.	Bidang/Sektor Sub. Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategik	Rencana Staregik Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 (tahun ke 1 dari 5 tahun)							Ket
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai Tujuan/Sasaran			
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Penyiapan Jasa Publik Yang Transparan, Responsive dan Bertanggungjawab serta Professional. 7. Penjaminan Terhadap Masyarakat Atas Keamanan Ketertiban dan Ketentraman.	2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha, Perkembangan IPTEK dan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dunia Usaha serta Peningkatan Kualitas SDM.	1. Mengoptimalkan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha.	1. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pemanjapan Kehidupan Beragama, Membuka Peluang Lapangan Kerja Serta Pembinaan Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Masyarakat.	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanjapan Kehidupan Beragama; 2. Pembinaan Tradisi dan Nilai-nilai Budaya;	6. Pembangunan Sarana Perkotaan. 7. Pembangunan Desa 1. Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Penataan Ruang. 1. Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama. 2. Pembinaan Pendidikan Agama. 1. Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan dan Kepustakaan. 2. Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 3. Pembangunan Keolahragaan . 4. Partisipasi Sosial Masyarakat. 5. Pembinaan Anak dan Remaja.	

No.	Bidang/Sektor Sub. Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategik	Rencana Staregik Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 (tahun ke 1 dari 5 tahun)							Ket
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai Tujuan/Sasaran			
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<p>2. Menerapkan perkembangan IPTEK.</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.</p>	<p>1. Menerapkan Perkembangan IPTEK Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penerapan Teknik Industri Penelitian dan Pengkajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan dan Sosial serta Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan.</p>	<p>1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pengembangan Teknik Produksi;</p> <p>2. Penelitian dan Pengkajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>2. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Sosial;</p>	<p>1. Pengembangan Listrik Pedesaan.</p> <p>2. Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan</p> <p>3. Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan Rakyat.</p> <p>1. Pengembangan Daerah Tingkat II.</p> <p>2. Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>1. Pembinaan Pendidikan Dasar.</p> <p>2. Pembinaan Pendidikan Menengah.</p> <p>1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat.</p> <p>2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.</p> <p>3. Pelayanan Rujukan dan Pengobatan Tradisional.</p> <p>4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.</p>	

No.	Bidang/Sektor Sub. Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategik	Rencana Staregik Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 (tahun ke 1 dari 5 tahun)							Ket
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai Tujuan/Sasaran			
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								3. Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan;	5. Operasi dan Perawatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 6. Pengawasan Obat dan Makanan. 7. Penyehatan Lingkungan Pemukiman. 8. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman. 9. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 10. Penanggulangan Bencana Alam. 1. Peningkatan Efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur. 2. Pendayagunaan Sistem dan Pengawasan. 3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan.	

No.	Bidang/Sektor Sub. Sektor	Kebijaksanaan Nasional Strategik	Rencana Staregik Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 (tahun ke 1 dari 5 tahun)							Ket
			Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara mencapai Tujuan/Sasaran			
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					<p>3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Memanfaatkan Terbukanya Pasar Global, Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha serta Pesatnya Perkembangan IPTEK.</p>	<p>1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>2. Memanfaatkan Terbukanya Pasar Global.</p> <p>3. Memanfaatkan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dunia Usaha.</p>	<p>1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Usaha-usaha Ekonomi Yang Didukung Oleh Stabilitas Keamanan Yang Dinamis.</p> <p>1. Memanfaatkan Terbukanya Pasar Global Melalui Pengembangan Produktivitas dan Kesempatan Kerja serta Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi.</p> <p>1. Memanfaatkan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dunia Usaha Melalui Pengembangan Sistem Informasi.</p>	<p>1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Ekonomi;</p> <p>2. Pembinaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat</p> <p>1. Pembinaan, Pengembangan Produktifitas dan Kesempatan Kerja;</p> <p>2. Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi;</p> <p>1. Pengembangan Sistem Informasi;</p>	<p>1. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.</p> <p>1. Pembinaan Kekuatan Rakyat.</p> <p>2. Penyuluhan Hukum.</p> <p>3. Perencanaan dan Pembentukan Hukum</p> <p>1. Pelatihan dan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja.</p> <p>2. Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.</p> <p>1. Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi.</p> <p>1. Pengembangan Operasi Penerangan.</p> <p>2. Pembinaan dan Pengembangan Pers di Daerah.</p>	

EVALUASI KINERJA KEGIATAN (EK-1)

INSTANSI : PEMERINTAH KAB. LAMONGAN

TAHUN : 2002

Form EK-1

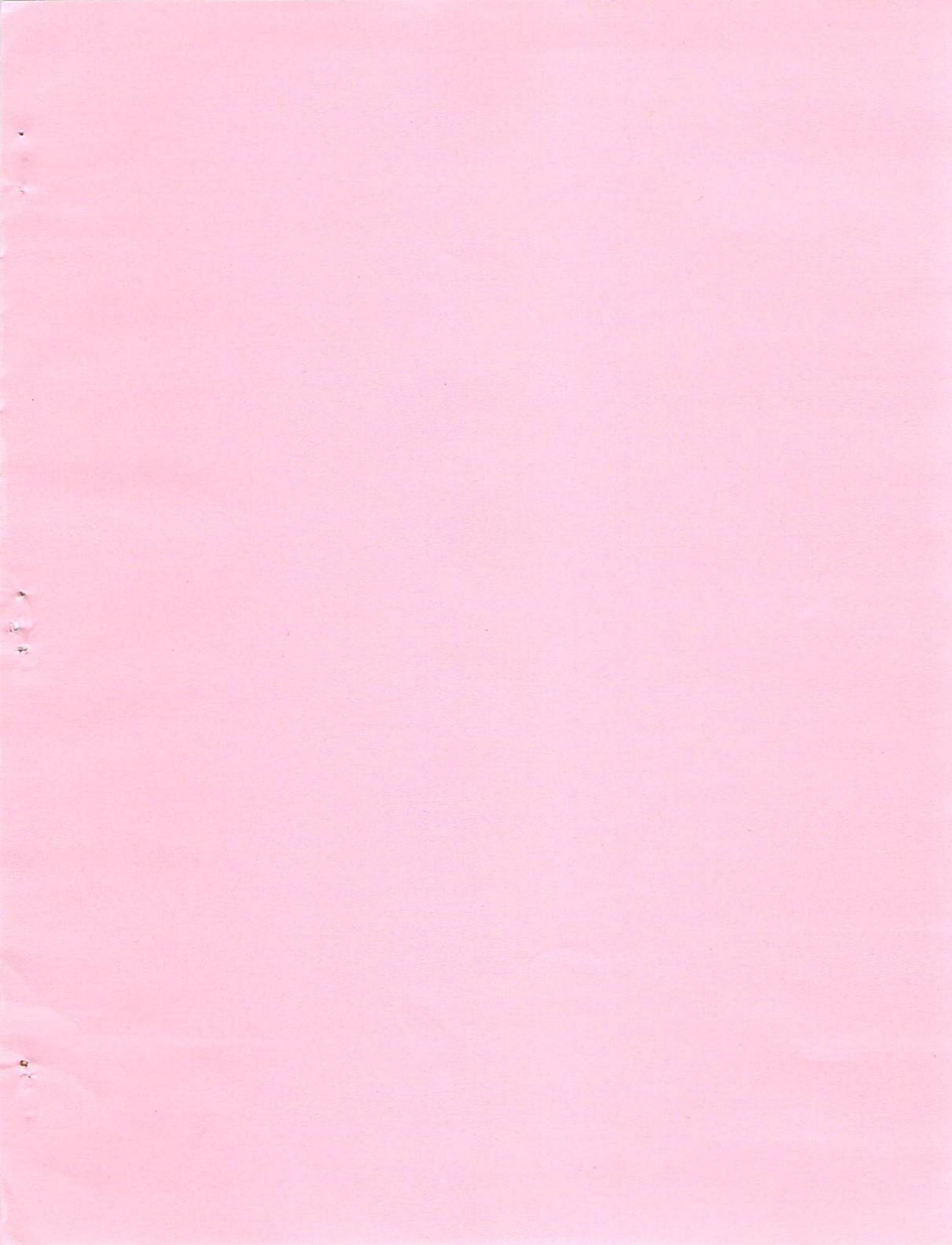
NO.	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	JML NILAI CAP KEMP KEGIATAN %
1.	Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah melalui peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah	1. Pemantapan pelaksanaan otonomi Daerah	1. Pembinaan politik Daerah	80,66
		2. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah	1. Pendidikan dan pelatihan aparatur	92,79
		3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92,03
2.	Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan Daerah khususnya pariwisata usaha Daerah dan lembaga keuangan Daerah	1. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	1. Pengembangan pariwisata	84,7
			2. Penerimaan pendapatan daerah	90,21
			3. penyertaan modal pemerintah	93,64
		2. pembinaan kekayaan daerah dan perusahaan - perusahaan daerah	1. Pengembangan lembaga keuangan	77,43

3.	Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah khususnya pertanian, kelautan dan industri	<p>1. Pembangunan dan pengembangan usaha pertanian, industri daerah dan kelautan</p> <p>2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur</p>	<p>1. Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah 91,61</p> <p>2. Peningkatan kemampuan teknologi industri 89,8</p> <p>3. Pembangunan pertanian rakyat terpadu 85,51</p> <p>4. Pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian 84,22</p> <p>5. Pengembangan usaha perkebunan 80,75</p> <p>6. Pembangunan peternakan rakyat terpadu 93,79</p> <p>7. Pengembangan sumber daya sarana dan prasarana perikanan 89,4</p> <p>8. Pengembangan usaha Hutan rakyat 79,17</p> <p>9. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut dan pelayaran laut 89,2</p> <p>1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 90,83</p> <p>2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan 90,7</p> <p>3. Peningkatan jalan & penggantian jembatan 90,7</p> <p>4. Pembangunan jalan dan jembatan 90,4</p> <p>5. Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan 90,8</p> <p>6. Pembangunan sarana perkotaan 87</p> <p>7. Pembangunan desa 75,39</p> <p>8. Pembangunan psar Ikan 82,50</p> <p>9. Pemasangan LPJU 87,76</p>	
----	--	---	---	--

4.	Meningkatkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan kehidupan beragama membuka peluang lapangan kerja serta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat	3. Pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang	1. Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	90,7
			2. Penataan ruang	91,1
5.	Menerapkan perkembangan iptek untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik industri penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah .	1. Pemberdayaan masyarakat pemantapan kehidupan beragama	1. Peningkatan sarana kehidupan beragama	96,5
			2. Pembinaan pendidikan agama	95
		2. Pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya	1. Pembinaan kebahasaan, kesastraan dan kepastakaan	84,46
			2. Pembinaan dan pengembangan generasi muda	87
			3. Pembangunan keolahragaan	86,61
			4. Partisipasi sosial masyarakat	86,63
			5. Pembinaan anak dan remaja	87,97
6.	meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan, pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan	1. peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan teknik produksi	1. pengembangan listrik pedesaan	89,7
			2. sistem manajemen administrasi kependudukan	90,15
			3. pembangunan dan pengembangan pertambangan rakyat	88,45
			4. Bantuan teknologi tepat guna	92,58
		2. penelitian pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah	1. pengembangan daerah tingkat II	93,3
			2. perencanaan pembangunan daerah	88,59
			3. Penelitian pendukung perencanaan Pembangunan	86,66
		1. peningkatan pendidikan dan pelatihan	1. pembinaan pendidikan dasar	94,61
			2. pembinaan pendidikan menengah	96,58

7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis	2. peningkatan derajat kesehatan dan sosial	1. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan perbaikan gisi masyarakat	85,65	
			2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit	94,80	
			3. Pelayanan rujukan dan pengobatan tradisional	94,72	
			4. Pelayanan kesehatan masyarakat	90	
			5. Operasi dan perawatan fasilitas pelayanan kesehatan	-	
			6. Pengawasan obat dan makanan	-	
			7. Penyehatan lingkungan pemukiman	79,61	
			8. Perbaikan perumahan dan permukiman	80,93	
			9. Pelayanan dan rehabilitasi sosial	92,12	
			10. Penanggulangan bencana alam		
7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis	3. Pendayagunaan sistem dan pengawasan	1. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur	90,5	
			2. Pendayagunaan sistem dan pengawasan	88,43	
			3. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan	80	
7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis	1. Pembinaan dan pengembangan usaha-usaha ekonomi	1. Pembinaan dan pengembangan koperasi	79	
			2. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	1. Pembinaan kekuatan rakyat	88,32
				2. Penyuluhan hukum	90
				3. Perencanaan dan pembentukan hukum	86
			4. Pembekalan kelinmasan bagi aparatur	85	

8.	Memanfaatkan terbukanya pasar global melalui pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja serta pengembangan perdagangan dan sistem distribusi	<p>1. Pembinaan pengembangan produktifitas dan kesempatan kerja</p> <p>2. Pengembangan perdagangan sistem distribusi</p>	<p>1. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja</p> <p>2. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja</p> <p>3. Pengerahan dan pembinaan Transmigrasi.</p> <p>1. Pengembangan perdagangan dan sistem distribusi</p> <p>2. Pengembangan fasilitas pasar daerah</p> <p>3. Optimalisasi pengembangan potensi Daerah, soaial ekonomi dan ketentraman Daerah</p>	<p>88,50</p> <p>79,25</p> <p>78,4</p> <p>78,04</p> <p>92,2</p> <p>90,21</p> <p>86,34</p>
9.	Memanfaatkan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha melalui pengembangan sistem informasi	1. Pengembangan sistem informasi	<p>1. Pengembangan operasi penerangan</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan pers daerah</p> <p>3. Pembangunan E-Governmen</p> <p>4. Peningkatan kemampuan teknologi</p>	<p>88,98</p> <p>81</p> <p>84,49</p> <p>92,90</p>



EVALUASI KINERJA PROGRAM (EK-2)

INSTANSI : PEMERINTAH KAB. LAMONGAN
TAHUN : 2002

Form EK-2

NO.	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	JML NILAI CAP KELP KEGIATAN %	BOBOT KEGIATAN %	NILAI CAP AKHIR %	
1.	Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah melalui peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah	1. Pemantapan pelaksanaan otonomi Daerah	1. Pembinaan politik Daerah	80,66	100	80,66	
		2. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah	1. Pendidikan dan pelatihan aparatur	92,79	100	92,79	
		3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92,03	100	92,03	
2.	Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan Daerah khususnya pariwisata usaha Daerah dan lembaga keuangan Daerah	1. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	1. Pengembangan pariwisata	84,7	35	29,64	
			2. Penerimaan pendapatan daerah	90,21	35	31,57	
			3. penyertaan modal Pemerintah	93,64	30	28,09	
					89,3		
		2. pembinaan kekayaan daerah dan perusahaan – perusahaan daerah	1. Pengembangan lembaga keuangan	77,43	100	77,43	

3.	Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah khususnya pertanian, kelautan dan industri	1. Pembangunan dan pengembangan usaha pertanian, industri daerah dan kelautan	1. Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah	91,61	12	11
			2. Peningkatan kemampuan teknologi industri	89,8	11	9,9
			3. Pembangunan pertanian rakyat terpadu	85,51	11	9,4
			4. Pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian	84,22	11	9,3
			5. Pengembangan usaha perkebunan	80,75	11	8,8
			6. Pembangunan peternakan rakyat terpadu	93,79	11	10,32
			7. Pengembangan sumber daya sarana dan prasarana perikanan	89,4	11	9,8
			8. Pengembangan usaha Hutan rakyat	79,17	11	8,79
			9. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut dan pelayaran laut	89,2	11	9,84

					<u>87,15</u>	
		2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur	1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	90,83	11	10
			2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	90,7	11	10
			3. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan	90,7	12	11

			4. Pembangunan jalan dan jembatan	90,4	11	9,90
			5. Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan	90,8	11	10
			6. Pembangunan sarana perkotaan	87	11	9,6
			7. Pembangunan desa	75,39	11	8,3
			8. Pembangunan psar Ikan	82,50	11	9,08
			9. Pemasangan LPJU	87,76	11	9,65

						86,54
		3. Pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang	1. Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	90,7	50	45,35
			2. Penataan ruang	91,1	50	45,55

						90,9
						=====
4.	Meningkatkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan kehidupan beragama membuka peluang lapangan kerja serta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat	1. Pemberdayaan masyarakat pemantapan kehidupan beragama	1. Peningkatan sarana kehidupan beragama	96,5	50	48,07
			2. Pembinaan pendidikan agama	95	50	47,50

						95,57
						=====
		2. Pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya	1. Pembinaan kebahasaan, kesastraan dan kepustakaan	84,46	20	16,89
			2. Pembinaan dan pengembangan generasi muda	87	20	17,40
			3. Pembangunan keolahragaan	86,61	20	14,63
			4. Partisipasi sosial masyarakat	86,63	20	15,33
			5. Pembinaan anak dan remaja	87,97	20	17,59

						83,84
						=====

5	Menerapkan perkembangan iptek untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik industri penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah .	1. peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan teknik produksi	1. pengembangan listrik pedesaan	89,7	25	22,43		
			2. sistem manajemen administrasi kependudukan	90,15	25	22,54		
			3. pembangunan dan pengembangan pertambahan rakyat	88,45	25	22,24		
			4. Bantuan teknologi tepat guna	92,58	25	23,15		
							-----	90,36
		2. penelitian pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah	1. pengembangan daerah tingkat II	93,3	35	32,66		
			2. perencanaan pembangunan daerah	88,59	35	31		
			3. Penelitian pendukung perencanaan Pembangunan	86,66	30	26		
					-----	90		
6.	meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan, pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan	1. peningkatan pendidikan dan pelatihan	1. pembinaan pendidikan dasar	94,61	50	47,3		
			2. pembinaan pendidikan menengah	96,58	50	48,30		
							-----	95,6
		2. peningkatan derajat kesehatan dan sosial	1. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan perbaikan gisi masyarakat	85,65	17	14,56		
			2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit	93,80	14	13,13		
			3. Pelayanan rujukan dan pengobatan tradisional	94,72	14	13,26		
			4. Pelayanan kesehatan masy	90	14	12,60		

			5. Operasi dan perawatan fasilitas pelayanan kesehatan	-	-	-
			6. Pengawasan obat dan makanan	-	-	-
			7. Penyehatan lingkungan pemukiman	79,61	14	11,14
			8. Perbaikan perumahan dan permukiman	80,93	14	11,33
			9. Pelayanan dan rehabilitasi sosial	92,12	13	12
			10. Penanggulangan bencana alam	90,5	10	9

						97,02
						=====
		3. Pendayagunaan sistem dan pengawasan	1. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur	88,43	35	31
			2. Pendayagunaan sistem dan pengawasan	80	30	24
			3. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan	79	35	28

						83
						=====
7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis	1. Pembinaan dan pengembangan usaha-usaha ekonomi 2. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	1. Pembinaan dan pengembangan koperasi	88,32	100	88,32
			1. Pembinaan kekuatan rakyat	90	20	18
			2. Penyuluhan hukum	86	30	26
			3. Perencanaan dan pembentukan hukum	85	20	17

			4. Pembekalan kelinmasan bagi aparatur	88,50	30	26,55

						87,55
8.	Memanfaatkan terbukanya pasar global melalui pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja serta pengembangan perdagangan dan sistem distribusi	1. Pembinaan pengembangan produktifitas dan kesempatan kerja	1. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja	79,25	40	31,70
			2. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	78,4	35	27,44
			3. Pengerahan dan pembinaan Transmigrasi.	78,04	25	19,51

						78,65
						=====
		2. Pengembangan perdagangan sistem distribusi	1. Pengembangan perdagangan dan sistem distribusi	92,2	35	32,27
			2. Pengembangan fasilitas pasar daerah	90,21	35	31,57
			3. Optimalisasi pengembangan potensi Daerah, sosial ekonomi dan ketentraman Daerah	86,34	30	25,90

						89,74
						=====
9.	Memanfaatkan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha melalui pengembangan sistem informasi	1. Pengembangan sistem informasi	1. Pengembangan operasi penerangan	88,98	15	13,34
			2. Pembinaan dan pengembangan pers daerah	81	15	12,15
			3. Pembangunan E-Govenmen	84,49	30	25,35
			4. Peningkatan kemampuan teknologi	92,90	40	37,16

						88
						=====



EVALUASI KINERJA KEBIJAKSANAAN (EK-3)

INSTANSI : PEMERINTAH KAB. LAMONGAN
TAHUN : 2002

Form EK-3

NO.	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	NC. PROGRAM %	BOBOT %	NC. AKHIR %
1.	Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah melalui peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah	1. Pemantapan pelaksanaan otonomi Daerah	80,66	35	28,23
			2. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah	92,79	35	32,48
			3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92,03	30	27,61
						88,32
2.	Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah	Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan Daerah khususnya pariwisata usaha Daerah dan lembaga keuangan Daerah	1. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	89,3	60	53,58
			2. pembinaan kekayaan daerah dan perusahaan-perusahaan daerah	77,43	40	30,97
						84,55

3.	Menggali memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah	Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah khususnya pertanian, kelautan dan industri	1. Pembangunan dan pengembangan usaha pertanian, industri daerah dan kelautan	87,87	30	26,36
			2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur	86,54	35	30,29
			3. Pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang	90,9	35	31,82
						88,41
4.	Mengoptimalkan kerja sama antara daerah dan bina usaha	Meningkatkan kerjasama antar daerah dan dunia usaha melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan kehidupan beragama membuka peluang lapangan kerja serta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat	1. Pemberdayaan masyarakat pemantapan kehidupan beragama	95,57	60	57,34
			2. Pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya	83,84	40	33,54
						90,88
5.	Menerapkan perkembangan iptek	Menerapkan perkembangan iptek untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknik industri penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah .	1. meningkatkan pelayanan masyarakat dan pengembangan teknik produksi	90,36	60	54,22
			2. penelitian pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah	90	40	36
						90,22

6.	Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia	meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan, pendidikan dan pelatihan, peningkatan derajat kesehatan dan sosial serta pendayagunaan sistem dan pengawasan	1. peningkatan pendidikan dan pelatihan	95,6	35	33,46
			2. peningkatan derajat kesehatan dan sosial	97,02	35	33,96
			3. Pendayagunaan sistem dan pengawasan	83	30	24,9
						92,32
7.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang didukung oleh stabilitas keamanan yang dinamis	1. Pembinaan dan pengembangan usaha-usaha ekonomi	88,32	65	57,41
			2. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	87,55	35	30,64
						88,05
8.	Memanfaatkan terbukanya pasar global	Memanfaatkan terbukanya pasar global melalui pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja serta pengembangan perdagangan dan sistem distribusi	1. Pembinaan pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja	78,65	60	47,19
			2. Pengembangan perdagangan sistem distribusi	89,74	40	35,90
						83,09
9.	Memanfaatkan Deregulasi peraturan perundang-undangan Dunia Usaha	Memanfaatkan deregulasi peraturan perundang-undangan dunia usaha melalui pengembangan sistem informasi	1. Pengembangan sistem informasi	88	100	88
						88